



**Pemerintah
Kota Singkawang**



**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG**

2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun adalah laporan pelaksanaan dari masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2018-2022, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berkaitan antara dana Pemerintah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa tugas Wali Kota Singkawang periode tahun 2018-2022. Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan dalam hal pelayanan publik pada khususnya. Namun demikian masih ada juga hal-hal yang belum terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk bekerja lebih keras lagi pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Singkawang sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Atas keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang

Singkawang, 30 Maret 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,



Drs. SUMASTRO, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	6
3. Tugas dan Fungsi	8
4. Sumber Daya Aparatur	12
5. Sumber Daya Keuangan	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ...	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
1. Visi	16
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis ..	17
B. PRIORITAS DAERAH	23
C. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	32
B. REALISASI ANGGARAN	119
BAB IV : PENUTUP	123
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* tidaklah dapat berjalan dengan sendirinya tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, tetapi melibatkan *private sector* dan masyarakat dalam mengawal dan menggiring pemerintahan kearah berlangsungnya *good governance* terutama penyelenggaraan penyediaan *public good and service*. Koordinasi yang baik, integritas dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan *output* penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Mekanisme juga diperlukan dalam hal meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dan memperkuat peran serta legislatif baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, regulasi serta kerjasama pengambilan kebijakan strategis.

Sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik, maka setiap pemerintahan wajib berakuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyatakan "Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana Pasal 21, Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan memadai. Sebagai alat kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*, maka Laporan Kinerja dalam prespektif yang lebih luas berfungsi sebagai media informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja pemerintah yang telah dan seharusnya tercapai.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 ini juga merupakan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota Singkawang kepada Presiden Republik Indonesia yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
- o. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

- p. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;
- q. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
- r. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 123);
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 34);

1.1 Aspek Geografis

Kota Singkawang terletak pada wilayah Utara Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 55,85''$ - $01^{\circ} 01' 21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 51' 47,6''$ - $109^{\circ} 10' 19''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $504,00 \text{ Km}^2$ atau sekitar 0,34% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna

Letak Kota Singkawang berada pada jalur lintasan antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, menjadikan Kota Singkawang sebagai sentral *supply* dan *demand*. Secara ekonomis hal tersebut sangat menguntungkan karena memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian, baik sektor perdagangan, jasa, maupun

sektor lainnya sehingga membuka peluang lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

1.2 Aspek Demografi

Adapun dari sisi demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang tertanggal 31 Desember 2022 sebanyak 239.875 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdiri dari laki-laki berjumlah 122.729 jiwa dan perempuan berjumlah 117.146 jiwa dengan sebaran penduduk di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penduduk Kota Singkawang Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Singkawang Timur	12.761	11.505	24.266
2.	Singkawang Tengah	36.424	35.714	72.138
3.	Singkawang Barat	27.699	26.805	54.504
4.	Singkawang Utara	16.600	16.145	32.745
5.	Singkawang Selatan	29.245	26.977	56.222
	Jumlah	122.7	117.126	239.875

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Berdasarkan data kependudukan di atas maka kepadatan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2022 berkisar 6.766,96 jiwa/km², dimana penyebarannya masih belum merata. Penyebaran penduduk tersebut terpusat di Kecamatan Singkawang Tengah, selanjutnya pada Kecamatan Singkawang Selatan dan kemudian pada Kecamatan Singkawang Barat. Untuk lebih jelasnya komposisi kepadatan penduduk Kota Singkawang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan
Per Kecamatan Kota Singkawang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Singkawang Timur	166,26	24.266	145,95
2	Singkawang Tengah	31,57	72.138	2.285,02
3	Singkawang Barat	15,04	54.504	3.623,94
4	Singkawang Utara	66,65	32.745	491,30
5	Singkawang Selatan	224,48	56.222	250,45
Jumlah		504	239.875	6.796,66

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang,
diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang*

2. Susunan Organisasi

Sebagai daerah otonom Kota Singkawang memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan pemerintah kota sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, kepemudaaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Urusan pilihan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dengan pemisahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Singkawang sebagai daerah otonom mengemban tugas pembangunan daerah sesuai kewenangan yang telah diberikan, salah satu alat guna mencapai terwujudnya pelayanan masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah dengan penataan kelembagaan yang mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur Pemerintah Kota Singkawang. Tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh seorang sekretaris daerah, staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah. Perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. 15 (lima belas) dinas daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

- 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - 7) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Perhubungan;
 - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 12) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 15) Satuan Polisi Pamong Praja.
5. 4 (empat) badan daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Keuangan Daerah;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Lembaga teknis daerah terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
8. 5 (lima) kecamatan terdiri dari:
- 1) Kecamatan Singkawang Barat;
 - 2) Kecamatan Singkawang Tengah;
 - 3) Kecamatan Singkawang Selatan;
 - 4) Kecamatan Singkawang Utara; dan
 - 5) Kecamatan Singkawang Timur.

3. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unit kerja yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif dan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris daerah dibantu oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum.

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan serta mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris DPRD dibantu oleh kepala bagian, kepala sub bagian, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

Wali Kota;

- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, inspektur dibantu oleh sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bagian, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Badan Daerah

Badan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala badan mempunyai tugas membantu Wali Kota

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala badan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugasnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 2.971 orang, jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer. Adapun komposisi pegawai menurut golongan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Pegawai Menurut Golongan
Per 31 Desember 2022

Data Kepegawaian	Jumlah/ Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PNS Gol IV/a – IV/d	909	801	723	652	578
PNS Gol III/a – III/d	1.915	1.998	2.052	1.999	1.801
PNS Gol II/a – II/d	531	497	476	456	299
PNS Gol I/a – I/d	53	50	47	40	35
PPPK				4	258
Jumlah	3.408	3.346	3.398	3.147	2.971

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

6. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tahun 2022 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Singkawang
 Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	186.000.000.000	189.000.000.000	3.000.000.000	2%
4.1.1	Pendapatan pajak daerah	64.140.000.000	66.140.000.000	2.000.000.000	3%
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah	7.040.000.000	8.040.000.000	1.000.000.000	14%
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.839.224.000	6.839.224.000	-	0%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	107.980.776.000	107.980.776.000	-	0%
4.2	Pendapatan Transfer	683.438.000.395	708.473.614.448	25.035.614.053	4%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	621.263.447.000	638.816.170.000	17.552.723.000	3%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.174.553.395	69.657.444.448	7.482.891.053	12%
JUMLAH PENDAPATAN		869.438.000.395	897.473.614.448	28.035.614.053	3%
5	BELANJA				
5.1	Belanja Operasi	686.063.723.088	767.303.726.535	81.240.003.447	12%
5.1.1	Belanja pegawai	414.306.449.201	387.153.901.571	(27.152.547.630)	7%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.953.043.437	332.990.602.545	105.037.559.108	46%
5.1.3	Belanja Bunga	880.208.333	-	(880.208.333)	100%
5.1.5	Belanja Hibah	39.607.022.117	45.510.622.419	5.903.600.302	15%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.317.000.000	1.648.600.000	(1.668.400.000)	50%
5.2	Belanja Modal	108.132.848.736	157.959.463.886	49.826.615.150	46%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	718.200.000	12.839.803.449	12.121.603.449	1688%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.835.187.872	30.881.598.282	12.046.410.410	64%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.826.609.685	28.478.894.377	7.652.284.692	37%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.444.349.916	80.348.951.656	18.904.601.740	31%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.108.501.263	5.410.216.122	(698.285.141)	11%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000	-	(200.000.000)	100%
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000	5.850.000.000	(5.150.000.000)	47%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000	5.850.000.000	(5.150.000.000)	47%
JUMLAH BELANJA		805.196.571.824	931.113.190.421	125.916.618.597	16%
Total (Surplus/Defisit)		64.241.428.571	(33.639.575.973)	(97.881.004.544)	152%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan pembiayaan	-	76.881.004.544	76.881.004.544	
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	-	76.881.004.544	76.881.004.544	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	76.881.004.544	76.881.004.544	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	64.241.428.571	43.241.428.571	(21.000.000.000)	33%

6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.300.000.000	14.300.000.000	4.000.000.000	39%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	53.941.428.571	28.941.428.571	(25.000.000.000)	46%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		64.241.428.571	43.241.428.571	(21.000.000.000)	33%
Pembiayaan Neto		(64.241.428.571)	33.639.575.973	97.881.004.544	-152%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikembangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Singkawang dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Timbulnya permasalahan pembangunan karena adanya perbedaan yang dihasilkan antara indikator capaian kinerja yang harus dapat dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal;
- b) Adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya;
- c) Adanya peluang yang belum dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal; dan
- d) Ancaman yang sejak awal belum mendapatkan alternatif pemecahannya.

Dengan kondisi yang disebutkan diatas maka Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2022 meliputi :

- a. Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
- b. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum optimal, efektif dan efisien;
- c. Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;
- e. Terbatasnya infrastruktur dasar serta Pembangunan infrastruktur yang belum merata;
- f. Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
- i. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- j. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- k. Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- l. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal;
- m. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian; dan
- n. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan daerah Pemerintah Kota Singkawang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah dan rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1. Visi

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2018 – 2022, menetapkan visinya yaitu “**Singkawang HEBAT 2022**”.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
- b. Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
- c. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;

- d. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
- e. Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target visi secara optimal.

Adapun misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berkaitan dengan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Singkawang terkait dengan pernyataan misi untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan dapat

diuraikan dalam matriks keterkaitan antar visi dan misi dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Misi dan Tujuan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis Dan budaya	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi
			Persentase peningkatan seni budaya yang lestari
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif Dan mandiri	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi
			Angka kemiskinan
3	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	Persentase PDRB Sektor Pertanian
			Persentase PDRB Sektor Perikanan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM
6	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur
7	Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	PDRB sektor perdagangan
			PAD sektor pariwisata

Tabel 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif, dan toleran	1	Angka Kriminalitas
			2	Angka Konflik
	Persentase peningkatan seni budaya yang lestari	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume usaha koperasi
			2	Volume usaha umkm
			3	Nilai PDRB sektor industri
			4	Cakupan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	1
2	Angka kemiskinan			
Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	Persentase PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Persentase PDRB sektor Pertanian (%)
	Persentase PDRB Sektor Perikanan		2	Persentase PDRB Sektor perikanan (%)
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air
			2	Indeks kualitas udara
			3	indeks tutupan lahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks kepuasan masyarakat
			2	Indeks SPBE
			3	Nilai LPPD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP
			2	Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	1	Maturitas SPIP
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup
		Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah
			2	Angka rata-rata lama sekolah
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase Jalan mantap (%)
			2	Persentase penduduk berakses air minum (%)
			3	Persentase rumah layak huni
			4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani
		Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	volume usaha perdagangan
	PAD sektor pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan
			2	rata-rata lama tinggal

b. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah haruslah selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam satu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berpedoman pada:

- a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Angka Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Volume Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Volume Usaha UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6	Nilai PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
7	Cakupan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
10	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
14	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
15	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
16	Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
18	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah
19	Nilai SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika

20	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah
21	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah
22	Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
23	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
24	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Persentase jalan mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Persentase rumah layak huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
29	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani (%)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
30	Luas kawasan genangan banjir (Ha)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Volume usaha perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
32	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
33	Rata-rata lama tinggal (Hari)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis yang lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) level Pemerintah Kota Singkawang dan Perangkat Daerah.

B. Prioritas Daerah

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kelima dari RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, 3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis,

serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2022 ditetapkan dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Infrastruktur Menuju Singkawang Hebat 2022”

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Serta RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program Prioritas :

- Program Pengelolaan pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

b) Peningkatan Derajat Kesehatan

Program Prioritas :

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

c) Penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.

Program Prioritas :

- Program Penyelenggaraan Jalan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran
- Program Pengelolaan Penerbangan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

d) Pemulihan ekonomi

Program Prioritas :

- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- Program Pengembangan UMKM
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Program Pengembangan Ekspor
 - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- e) Pemantapan kinerja aparatur birokrasi

Program Prioritas :

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- Program Administrasi Umum
- Program Aplikasi Informatika
- Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Layanan dan Administrasi Keuangan
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- Program penelitian dan pengembangan daerah
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi

f) Pengembangan dan penataan kawasan

Program Prioritas :

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh

g) Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

Program Prioritas :

- Program Penanggulangan Kebakaran
- Program Penanganan Bencana
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Sampah
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

h) Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan

Program Prioritas :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan

- Program Pemenuhan Hak Anak
- Program Perlindungan Khusus Anak

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan komitmen melaksanakan amanah dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target kinerja, perjanjian kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja Wali Kota Singkawang Tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Wali Kota. Kinerja ini selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh Perangkat Daerah dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Pemerintah Kota Singkawang berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1 Angka Kriminalitas	15
		2 Angka Konflik	0
2	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1 Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	82,3
3	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1 Volume Usaha Koperasi	Rp 304.191.033.500
		2 Volume Usaha UMKM	Rp 836.522.442.400
		3 Nilai PDRB sektor industri	Rp 1.102.758.750
		4 Cakupan Ekonomi Kreatif	93,75
4	Meningkatnya investasi daerah	1 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85
		2	Angka Kemiskinan	4,6
6	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	4
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	2,16
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86
8	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	81
		2	Indeks Kualitas Udara	86
		3	Indeks Tutupan Lahan	36,53
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
		2	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (ST)
		3	Nilai SPBE	2,5 (cukup)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	BB
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
11	Meningkatnya kualitas system pengawasan internal	1	Maturitas SPIP	Level 3
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup	72,0
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,12
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap (%)	62,3
		2	Persentase penduduk berakses air minum	75
		3	Persentase rumah layak huni	92,25
		4	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani (%)	85,67
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir (Ha)	2.17
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	Rp 1.702.787.098.525

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
17	Berkembangnya sektor pariwisata	1 Jumlah kunjungan wisatawan	370.671
		2 Rata-rata lama tinggal	1,14

Keseluruhan sasaran strategis yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kota Singkawang Tahun 2022 diarahkan sebagai penunjang untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ingin dicapai dalam akhir masa RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1	Angka Kriminalitas	15	3,79	395,78%
		2	Angka Konflik	0	0	100%
2	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	82,3	86,45	105,04%
3	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	304.191.033.500	232.813.093.303	76,54%
		2	Volume Usaha UMKM	836.522.442.400	851.999.320.097	101,85%
		3	Nilai PDRB sektor industri	1.102.758.750.000	1.044.718.040.000	98,80%
		4	Cakupan Ekonomi Kreatif	93,75	100	106,67%
4	Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5	6,8	136%
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	8,63	79,37%
		2	Angka Kemiskinan	4,6	4,67	98,50%
6	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	4	9.34	233,50%
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	2,16	2,06	95,37%
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86	85,70	99,65%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	81	82,5	101,85%
		2	Indeks Kualitas Udara	86	87,22	101,42%
		3	Indeks Tutupan Lahan	36,53	34,42	94,22%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	85,04	89,52%
		2	Nilai LPPD	Sangat tinggi	n/a	n/a
		3	Nilai SPBE	2,5 (Cukup)	2,6	104%

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	BB	BB	80%
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	n/a	n/a
11	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup	72,0	72,46	100,64%
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,92	99,92%
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,12	8,19	100,86%
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap	62,3	60,25	96,71%
		2	Persentase penduduk berakses air minum	75	86,4	115,20%
		3	Persentase rumah layak huni	92,25	97,91	106,14%
		4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani (%)	85,67	57,33	66,92%
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir (Ha)	2,17	2,065	105,08%
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	1.702.787.098.525	1.524.819.330.000	89,55%
17	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	370.671	1.008.607	272,10%
		2	Rata-rata lama tinggal (Hari)	1,14	2,09	183,33%

Hasil pengukuran kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Toleran

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran	1	Angka Kriminalitas	15	3,79	395,78%
		2	Angka Konflik	0	0	100%
Rata-rata capaian					247,89%	

Indikator Sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran digambarkan melalui indikator angka kriminalitas dan angka konflik. Realisasi kinerja pada indikator angka kriminalitas sangat jauh melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerjanya sebesar 395,78%, sedangkan realisasi kinerja pada indikator angka konflik tercapai hingga 100%. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran telah berhasil dilaksanakan dengan hasil capaian rata-rata sebesar 247,89%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.228.000	29.219.075	99,97	247,89	154,86
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	60.518.700	50.929.900	84,16		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	200.763.200	199.963.200	99,60		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	36.647.800	32.427.800	88,48		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
	Penanganan Konflik Sosial					
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	998.653.517	996.184.340	99,75		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.261.800	13.161.800	86,24		
Rata-rata				93,03	247,89	154,86

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 93,03% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 247,89%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 154,86%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

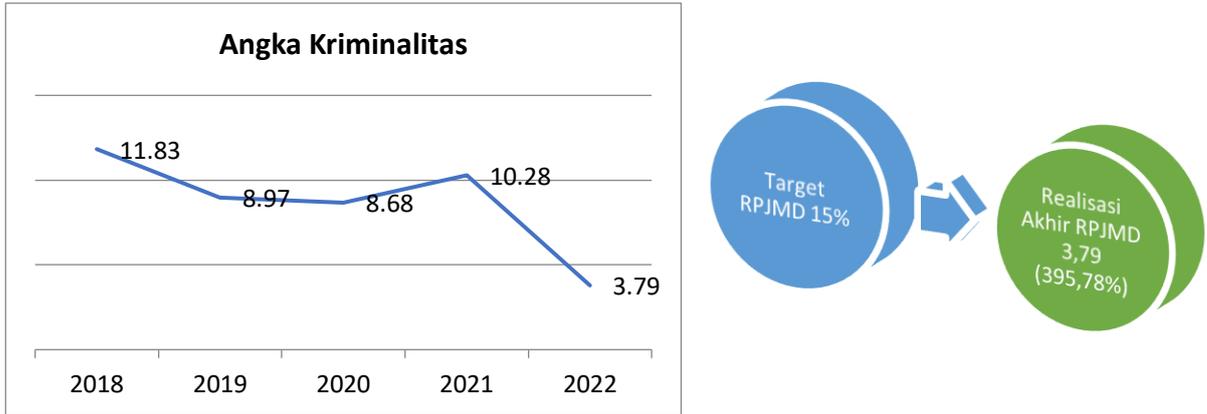
Dalam upaya mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Kondusif dan tertoleran, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 Program yang termasuk dalam Perjanjian Kinerja yang mendukung capaian indikator angka kriminalitas yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 135% dan tingkat efisiensi mencapai 35,03%
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan capaian kinerja 108,70% dan tingkat efisiensi mencapai 9,99%

Dan untuk Indikator Pendukung ada 1 Program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 138,35% dan tingkat efisiensi mencapai 42,22%.

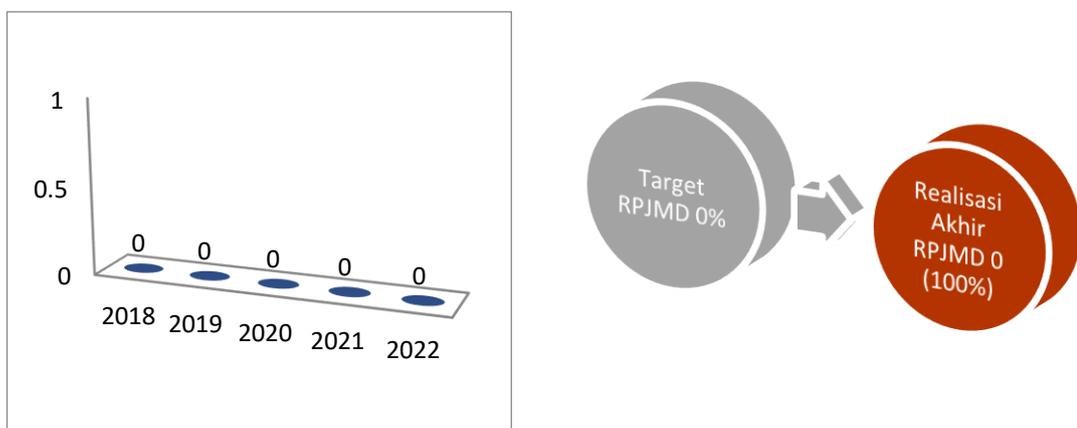
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja



Data kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tercipta dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi.

Jika dilihat dari grafik, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 akhir masa RPJMD angka kriminalitas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kriminalitas di Kota Singkawang semakin menurun, berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah penduduk.



Begitu juga dengan angka konflik di Kota Singkawang dari tahun ke tahun selalu nihil. Hal ini berharap untuk terus dipertahankan sehingga

kehidupan masyarakat semakin kondusif serta toleran untuk mendukung Kot Singkawang sebagai kota jasa, perdagangan dan pariwisata.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Meskipun berdasarkan data capaian kinerja pada indikator dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran melebihi target capaian kinerja, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih kurangnya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan maupun dibagian Administrasi, saat ini hanya berjumlah 84 orang. Idealnya untuk kategori kota berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk kota singkawang seharusnya jumlah anggota satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 251 sampai dengan 350 orang.
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

Pemecahan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tentang perhitungan kembali keperluan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Memberikan sosialisasi berupa himbauan, pemasangan spanduk, pamflet, media cetak dan media elektronik akan pentingnya menjaga K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan).
4. Mensosialisasikan PERDA dan PERKADA yang harus ditegakkan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar instansi terkait, seperti TNI dan POLRI.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	1 Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	82,3	86,45	105,04

Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari pada tahun 2022 terealisasi sebesar 86,45%, dengan target 82,3% maka capaian pada sasaran dan indikator ini adalah sebesar 105,04%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	670.916.400	668.278.400	99,61	105,04	5,7
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	8.012.600	7.939.000	99,08		
Rata-rata				99,34	105,04	5,7

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,34% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,04%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya terjadi efisiensi sebesar 5,7%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

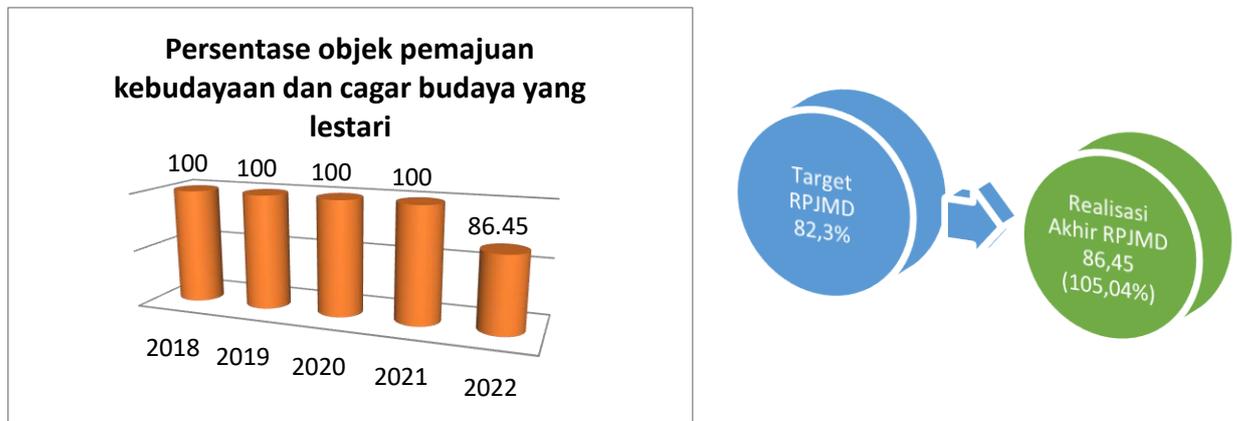
Adapun program, yang mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya pengembangan kelestarian budaya dengan capaian kinerja 105,04%, yaitu :

- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD 2022



Berdasarkan grafik di atas, apabila dilihat dari capaian kinerja mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021 persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari mencapai 100%. Walaupun di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86,45% yang dikarenakan identifikasi ulang dan pemuktahiran data cagar budaya, persentase tersebut telah berhasil melampaui target akhir capaian RPJMD Tahun 2022 dengan capaian sebesar 105,04%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Berdasarkan pencapaian kinerja, terlihat bahwa pencapaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2022, namun dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat hambatan dan permasalahan yang cukup mempersulit dalam pencapaian target. Adapun hambatan dan permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum maksimalnya peran lembaga/pranata kebudayaan.
2. Belum maksimalnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
3. Kurangnya wadah untuk mengembangkan kekayaan budaya.

4. Masih kurangnya peran stakeholder dalam upaya pelestarian cagar budaya.
5. Belum adanya tim ahli cagar budaya.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.8
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	304.191.033.500	232.813.093.303	76,54
		2	Volume Usaha UMKM	836.522.442.400	851.999.320.097	101,85
		3	Nilai PDRB Sektor Industri	1.102.758.750.000	1.044.718.040.000	94,73
		4	Cakupan Ekonomi Kreatif	93,75	100	106,67
Rata-rata					94,95	

Dalam mencapai sasaran strategis ke 3 yaitu meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif diukur melalui 4 (empat) indikator.

Indikator pertama adalah volume usaha koperasi dengan target Rp.304.191.033.500, pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.232.813.093.303 sehingga capaiannya adalah 76,54%.

Indikator kedua yaitu volume usaha UMKM yang realisasinya tahun 2022 sebesar Rp.851.999.320.097 melebihi dari target yang telah ditetapkan Rp. 836.522.442.400 sehingga capaiannya adalah 101,85%.

Indikator ketiga yaitu Nilai PDRB sektor industri dengan target tahun 2022 sebesar Rp1.102.758.750.000 realisasinya adalah Rp1.044.718.040.000 sehingga capaiannya 94,73%.

Indikator keempat adalah cakupan ekonomi kreatif dengan target tahun 2022 sebesar 93,75%, realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya menjadi 106,67%.

Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif secara rata-rata capaiannya adalah 94,95%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	92.040.700	85.314.300	92,69	94,95	n/a
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	70.671.700	54.483.900	77,09		
	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	317.083.900	265.657.920	83,78		
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	84.209.500	80.884.100	96,05		
	Pengembangan UMKM	2.016.633.550	915.570.850	45,40		
	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.232.709.360	1.796.184.395	80,45		
	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	167.573.200	144.014.950	85,94		
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.287.622.800	1.254.072.380	97,39		
	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	92.342.400	92.121.270	99,76		
Rata-rata				84,28	94,95	n/a

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 84,28% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 94,95%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran ini masih belum dilaksanakan secara efisien walaupun dari 4 indikator terdapat 2 indikator yang dapat tercapai melampaui target.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 9 (sembilan) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yang capaian kinerjanya 100% adalah:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- e. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

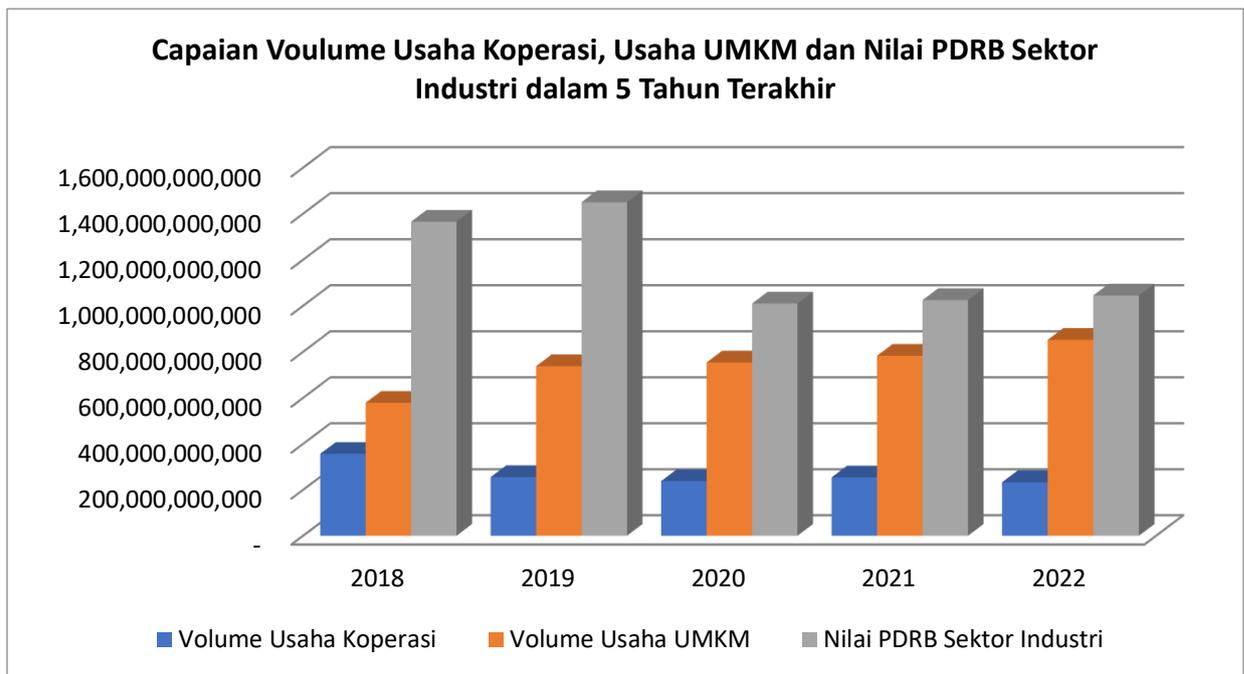
Sedangkan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai 100% yaitu :

- a. Program pengembangan UMKM dengan capaian kinerja 99,99%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
- b. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan capaian kinerja 97,70%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 70,50%, yang dilaksanakan melalui :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
 2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian kinerja 55%, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
 2. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET AKHIR RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	Volume Usaha Koperasi	356.313.893.905	255.404.657.566	237.699.347.613	253.966.051.385	232.813.093.303	304.191.033.500
	Volume Usaha UMKM	578.596.014.000	737.771.510.097	753.658.510.097	782.901.050.097	851.999.320.097	836.522.442.400
	Nilai PDRB Sektor Industri	1.365.096.700.000	1.449.967.880.000	1.009.686.970.000	1.024.706.390.000	1.044.718.040.000	1.102.758.749.550
	Cakupan Ekonomi Kreatif	41,67	75	100	100	100	93,75



Pada akhir RPJMD tahun 2022 pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif yaitu pada indikator volume usaha koperasi masih belum mencapai target RPJMD. Adanya

trend peningkatan pada indikator volume usaha UMKM yang cukup signifikan dimulai dari tahun 2020 ketahun 2021 dan berlanjut pada tahun 2022 sehingga capaiannya dapat melebihi target. Indiator Nilai PDRB pada tahun 2022 mengalami kenaikan begitu juga pada tahun 2021, namun kenaikan ini belum dapat mencapai target akhir RPJMD. Indikator cakupan ekonomi kreatif telah mencapai angka 100% selama 5 tahun berturut-turut sehingga melebihi target akhir RPJMD.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

1. Indikator volume usaha koperasi, tidak memenuhi target dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut:
 - a. Masih terdapat koperasi tidak secara aktif menjalankan usaha koperasi, hanya 79 koperasi yang aktif dari 105 koperasi.

- b. Terbatasnya kapasitas SDM pembina koperasi untuk melaksanakan pembinaan koperasi.
- c. Kurangnya kompetensi SDM pengurus/ pengelola koperasi khususnya terkait manajemen koperasi serta penyusunan Laporan Triwulan.
- d. Pengelolaan koperasi oleh pengurus belum menjadi prioritas utama sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan koperasi yang ada.
- e. Lemahnya kaderisasi dalam pengurusan kelembagaan koperasi.
- f. Masih banyak pengurus/ pengelola koperasi yang belum memahami kriteria dalam penilaian kesehatan koperasi.
- g. Kurangnya koperasi yang memenuhi standar kesehatan koperasi.
- h. Masih rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh pada pengelolaan koperasi.

Beberapa upaya telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Peningkatan kompetensi SDM pembina koperasi.
 - c. Peningkatan pembinaan terhadap pengurus/ pengelola koperasi.
 - d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Triwulan dalam menunjang peningkatan kompetensi SDM pengurus/ pengelola koperasi.
 - e. Peningkatan pengawasan terhadap koperasi.
 - f. Bimbingan serta pengawasan terhadap pengurus/ pengelola koperasi dari pemerintah selaku pembina Koperasi.
 - g. Diadakan pelatihan bagi pengurus, pengelola dan Pengawas Koperasi dalam peningkatan dan penambahan ilmu serta wawasan SDM dalam pengelolaan manajemen perkoperasian terkait dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Indikator volume usaha UMKM dapat dicapai karena beberapa hal antara lain:
- a. Pemerintah melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM.

- b. Adanya bantuan Pemerintah untuk sarana prasarana pendukung produksi UMKM.
- c. Semakin berkembangnya kreatifitas kelompok UMKM dalam mengembangkan daya jual produknya.
- d. Meningkatnya jiwa kewirausahaan pada kelompok UMKM.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume UMKM, antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar nasional.
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha mikro kecil yang dikelola sehingga perlu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengembangan usaha bagi UMKM.
 - c. Lemahnya kompetensi pengelola UMKM.
 - d. Belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok UMKM.
3. Indikator nilai PDRB sektor industri tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan antara lain:
- a. Masih sedikit IKM yang mendapat bantuan berupa sarana dan prasarana produksi, baik dalam bentuk mesin, peralatan maupun rumah produksi.
 - b. Kurangnya keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku IKM
 - c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas pelaku IKM yang berpengaruh pada peningkatan produksi.
 - d. Tidak adanya promosi melalui even-even berskala lokal maupun nasional.
 - e. Fasilitasi pemerintah untuk mendorong IKM untuk membentuk sentra IKM.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas daya saing produk IKM melalui berbagai pelatihan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
- b. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha IKM.
- c. Memberikan pelatihan tentang penguasaan teknologi kepada pelaku IKM.

- d. Memperluas jaringan usaha kerjasama antara pelaku IKM dengan pasar modern terkait sistem pemasaran.
 - e. Fasilitasi pemerintah terhadap IKM dalam mendukung terbentuknya sentra IKM sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.
4. Indikator cakupan ekonomi kreatif, dapat dicapai karena beberapa hal antara lain :
- a. Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif secara terus menerus untuk pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif yang lebih optimal.
 - b. Dukungan dari *stakeholders* terhadap pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

Meskipun seluruh sub sektor sudah tersentuh, masih ada para pelaku ekonomi kreatif di dalam tiap sub sektor yang belum terfasilitasi, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya. Kedepannya pemerintah akan mengembangkan pusat kreasi yang dibangun secara konsisten dan continue dengan memberdayakan pelaku Ekonomi Kreatif dalam suatu ekosistem yang mendukung keterhubungan rantai nilai Ekonomi Kreatif.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Investasi Daerah	1 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5	6,80	136%

Dalam mengukur sasaran meningkatnya investasi daerah yaitu melalui indikator persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA. Pada tahun 2022 ini ditargetkan tumbuh sebesar 5%. Penetapan target pada RPJMD dengan memperhatikan trend pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, indikator persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA di Kota Singkawang

mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai akibat pandemi Covid-19 yakni -26,49%. Namun di tahun 2022 persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA kembali meningkat menjadi 6,80%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	298.999.500	296.940.000	99,31%	136%	45,86%
	Program Promosi Penanaman Modal	71.287.200	67.717.200	94,99%		
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.974.934	2.974.300	99,98%		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.358.839.050	1.036.698.661	76,29%		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000	307.530.000	80,10%		
Rata-rata				90,14%	136%	45,86%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran 136%, maka pada sasaran Meningkatkan Investasi Daerah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 45,86%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 5 (lima) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Investasi Daerah.

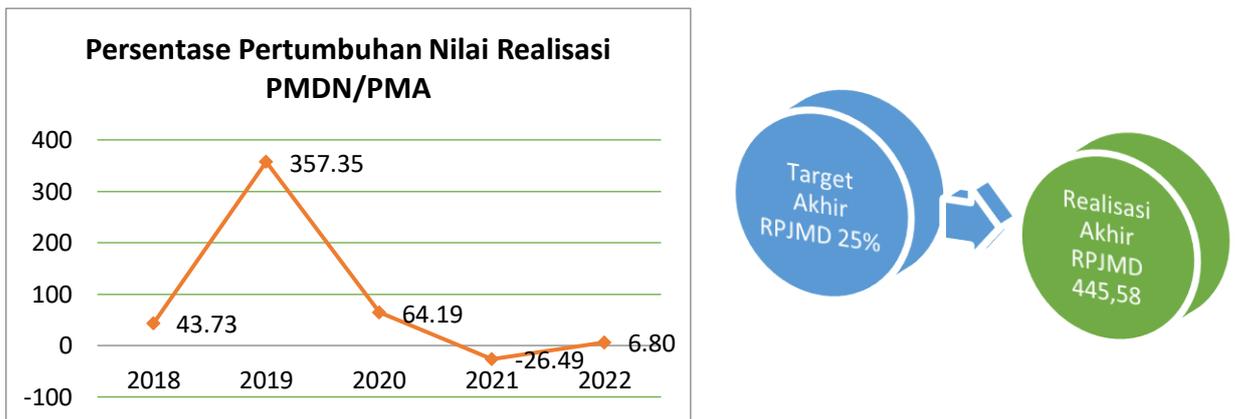
Adapun program yang mendukung pencapaian strategis dengan capaian 100% yaitu Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota.

Sedangkan program yang capaian kinerjanya belum mencapai 100% yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian kinerja 57,04%, dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan potensi investasi kabupaten/kota.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian kinerja 16,67%, dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian kinerja 98,10%, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian kinerja 75%, dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022



Persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Pandemi Covid-19 turut menyebabkan efek yang cukup membebani daerah namun realisasinya pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif yakni mampu rebound tumbuh 6,80 sehingga capaian tersebut berhasil mencapai target RPJMD dengan akumulasi selama 5 tahun berjalan. Sejak tahun 2018 sampai

dengan tahun 2022, persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA adalah sebesar 445,58%.

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	114	366	255	2.720	2.474
2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	110,57	505,70	830,28	610,36	651,89
3	Kenaikan / penurunan nilai realisasi (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	33,64	395,125	324,59	-219,92	41,53
4	Persentase kenaikan/penurunan nilai investasi	43,73	357,35	64,19	-26,49	6,80

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan serta Solusi yang Dilakukan

Dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan, seluruh program dibidang penanaman modal dapat tercapai dengan baik dan berada pada tingkat efesiensi penggunaan sumber daya yang sudah efisien. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

1. Peta potensi dan peluang investasi yang disusun belum berorientasi menarik minat investor luar negeri.
2. Kurangnya anggaran program kegiatan promosi penanaman modal, terutama keikutsertaan dalam event pameran investasi yang belum dapat diikuti karena masih terbatas pada penganggaran promosi.

Upaya dalam mengatasi hambatan dan kegagalan yang dilakukan, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan OPD teknis melalui tim koordinasi penanaman modal dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang, untuk membuat kajian peta potensi dan peluang investasi yang berorientasi untuk menarik minat investor PMA ke Kota Singkawang.
2. Mengikuti pameran atau event promosi penanaman modal di dalam negeri dan event pameran di luar negeri.

5. Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	8,63	79,37
		2	Angka Kemiskinan	4,60	4,67	98,50
		Rata – rata				88,94

Pada sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,63% dari 6,85% yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya adalah 79,37%. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2022 adalah 4,67%, dari target sebesar 4,60% sehingga pencapaiannya adalah 98,50%. Secara rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 88,94%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.767.877	166.111.421	76,99	88,94	n/a
	Penempatan Tenaga Kerja	1.023.694.100	27.337.100	2,67		
	Hubungan Industrial	18.470.420	16.579.900	89,76		
	Pemberdayaan Sosial	68.583.800	31.186.783	45,47		
	Penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	6.945.000	6.945.000	100		
	Rehabilitasi Sosial	385.121.267	384.606.945	99,87		
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	154.240.600	154.238.400	99,99		
	Penanganan Bencana	94.337.200	94.307.550	99,97		
	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.479.500	38.670.000	97,95		
	Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	57.117.998	56.923.500	99,66		
	Perlindungan Perempuan	27.869.000	11.888.000	42,66		

	Pemenuhan Hak Anak	88.705.500	76.466.461	86,20		
	Perlindungan Khusus Anak	33.940.000	20.120.000	59,28		
Rata - rata				76,96	88,94	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 76,96% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 88,94%, maka pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya masih belum mencapai 100%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan dengan capaian 100% atau lebih adalah sebagai berikut :

- a. Program penempatan tenaga kerja dengan capaian kinerja sebesar 136,42%, dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja.
- b. Program Penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan dengan capaian 100%, melalui kegiatan pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
 1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
 2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

- d. Program Penanganan Bencana dengan capaian kinerja 138%, melalui kegiatan:
 - 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
- e. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan capaian kinerja 100%
- g. Program Perlindungan Perempuan dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.
- h. Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan kewenangan kabupaten/kota.
- i. Program perlindungan khusus anak, dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

Sedangkan program yang kinerjanya belum mencapai 100% adalah sebagai berikut :

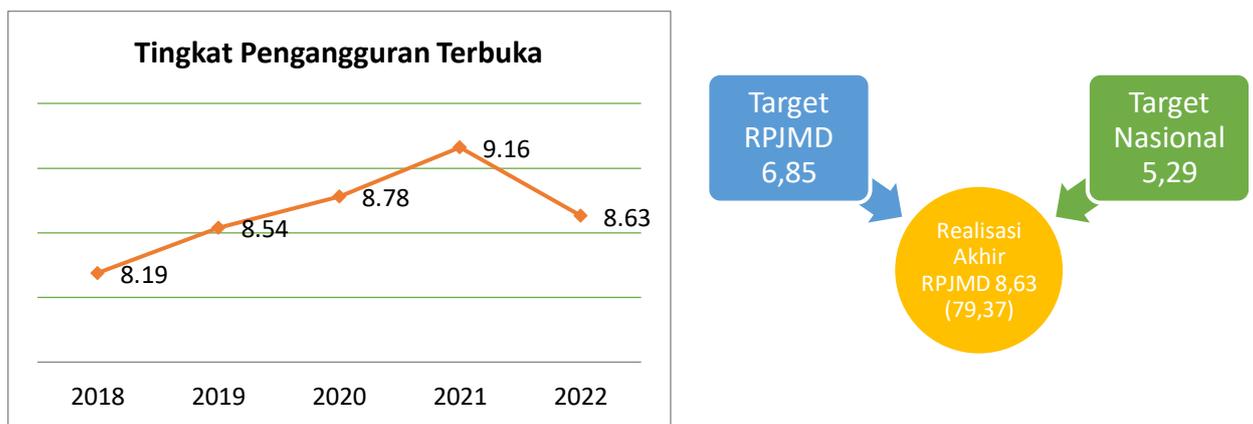
- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian kinerja 91,90%, melalui kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota.
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian kinerja 81,50%, melalui kegiatan :
 - 1. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

- d. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan capaian kinerja sebesar 37,50%, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- e. Program hubungan industrial dengan capaian kinerja sebesar 83,33%, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

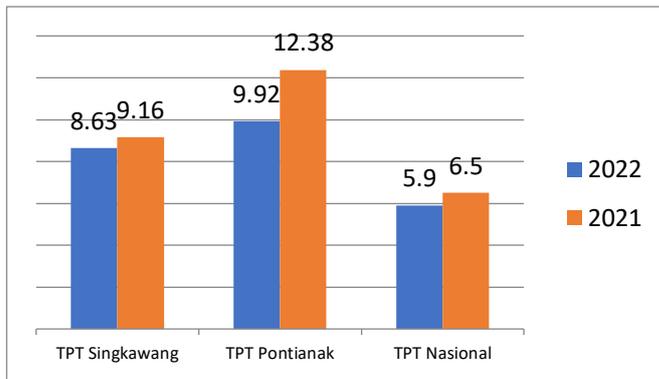
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

❖Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022

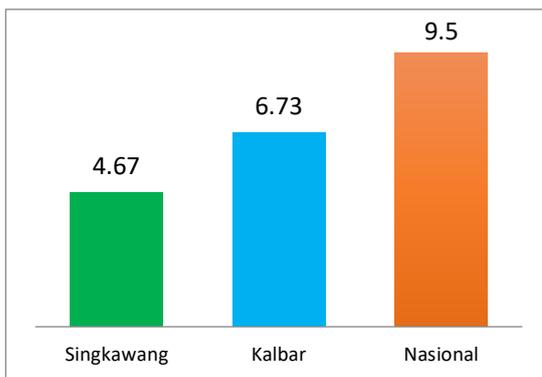
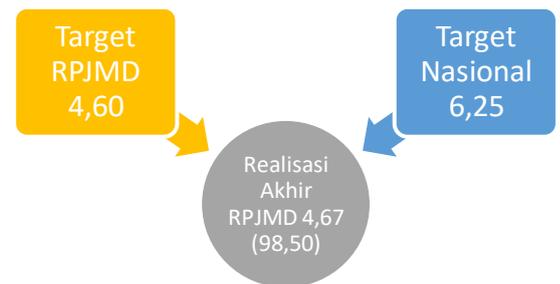
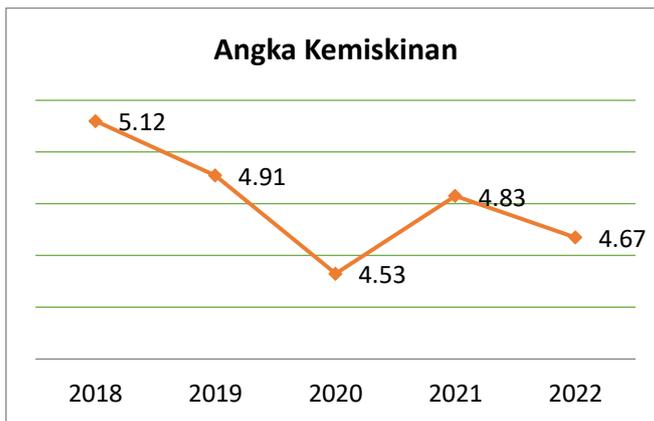


Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah memberikan dampak dalam perekonomian yang juga meberikan efek kepada angka pengangguran. Meskipun belum mampu mencapai target RPJMD, Pemerintah Kota Singkawang berusaha maksimal untuk menekan tingkat pengangguran yang dilakukan dengan program dan stimulus kebijakan pemerintah sehingga tingkat kesempatan kerja di Kota Singkawang mengalami perbaikan. Jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka



di Kota Singkawang masih belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Namun angka tersebut melewati capaian tingkat pengaguran terbuka di Kota Pontianak.

❖Angka Kemiskinan



Kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Singkawang sangat baik dengan trend yang terus menurun hingga tahun 2020, namun dampak pandemi Covid-19 meningkatkan kembali angka

kemiskinan di Singkawang. Meskipun belum mencapai target akhir RPJMD, angka kemiskinan Kota Singkawang telah melewati target nasional sehingga dapat dinyatakan kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam menekan angka kemiskinan sangat berhasil. Jika dibandingkan, angka kemiskinan di Kota Singkawang jauh dibawah angka Provinsi Kalimantan Barat ataupun angka nasional, dengan harapan angka kemiskinan di Kota Singkawang untuk terus ditekan lebih rendah.

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target akhir RPJMD disebabkan oleh:

- a. Tidak semua unit kejuruan pelatihan kerja yang ada di UPT LLK mendapatkan anggaran pelatihan kerja dari APBD setiap tahunnya. Dari 7 unit kejuruan, maksimal hanya 1 atau 2 unit kejuruan pelatihan saja yang mendapatkan anggaran pelatihan.
- b. Penganggaran pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, diberikan Dana Insentif Daerah (DID) pada pergeseran ke-2 perubahan APBD T.A 2022 hanya menyisakan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 minggu pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Akan dilakukan pengusulan anggaran untuk seluruh unit kejuruan pelatihan kerja yang ada di UPT LLK (7 unit kejuruan) mendapatkan anggaran pelatihan kerja dari APBD.
 - b. Mengingat bahwa pelaksanaan DID ini dapat dilaksanakan sampai dengan akhir bulan juni 2023, maka akan dilakukan persiapan dari berbagai hal termasuk regulasi teknis kegiatan sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya.
2. Indikator angka kemiskinan belum mencapai target, dikarenakan :
- a. Permasalahan PPKS semakin meningkat dan kompleks, sehingga perlu penanganan yang komperhensif dan terpadu dari berbagai pihak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Belum semua kategori pelayanan rehabilitasi bidang sosial bagi penyandang yang diwajibkan dalam SPM terlayani sepenuhnya.
 - c. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), kurangnya SDM yang professional untuk penanganan PMKS tertentu yang membutuhkan penanganan intensif.
 - d. Data kemiskinan yang tersedia relative belum mutakhir.

- e. Minimnya fasilitas pendukung prasarana seperti shelter/rumah singgah, terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- f. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
- g. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik.
- h. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang.
- i. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap.
- j. Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreativitas anak-anak yang bermasalah.
- k. Penilaian KLA melibatkan lintas sektoral dan aplikasi penilaian mandiri dilakukan tergantung kementerian PPPA sebagai leading sector.
- l. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT sering kali terhambat karena korban pada saat akan ditangani mencabut/membatalkan pengaduannya dan terbatasnya SDM yang memberikan layanan.

Sebagai upaya pencapaian kinerja maka strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Menyediakan sistem informasi atau aplikasi data kemiskinan daerah yang akan mendukung verifikasi dan validasi pemutakhiran data serta memfungsikan peran kecamatan dan kelurahan dalam melakukan pendataan.

- b. Memberikan layanan terpadu dalam membantu warga untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial non pemerintah.
- d. Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin.
- e. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial.
- g. Melakukan MOU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PMKS disabilitas mental.
- h. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- i. Dukungan anggaran yang memadai dan SDM yang berkualitas sesuai kompetensinya.
- j. Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
- k. Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Kota Singkawang.
- l. Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok rentan dan/atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- m. Penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien dan fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas.
- n. Peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat Khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.

- o. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terhadap permasalahan anak.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	4	9,34	233,50
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan (%)	2,16	2,06	95,37
Rata - rata						164,44

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian dan Nilai PDRB Sektor Perikanan. Pada kedua indikator ini menggunakan perhitungan angka sangat sementara yang dirilis oleh BPS Kota Singkawang. Indikator pertama yaitu nilai PDRB sektor pertanian dengan realisasi sebesar 9,34 dari target 4, sehingga capaian indikator nya mencapai 233,50%.

Indikator kedua yaitu nilai PDRB sektor perikanan, realisasi akhir tahun mencapai 2,06 dari target 2,16. Sehingga capaian kinerja mencapai 95,37%. Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan secara rata-rata capaiannya adalah 164,44%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI			
			TARGET	REALISASI	%					
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.651.396.400	433.131.000	26,23	164,44	81,03			
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.222.119.500	3.624.569.774	69,41					
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.985.700	9.996.700	91					
		Penyuluhan Pertanian	131.197.000	131.197.000	100					
		Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	484.606.940	477.257.787	98,48					
	Nilai PDRB Sektor Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.071.364.388	1.910.584.452	92,24					
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	133.610.900	127.577.425	95,48					
		Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	237.115.000	212.216.765	89,50					
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	99.722.500	88.073.500	88,32					
	Rata-Rata							83,41	164,44	81,03

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,41% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 164,44%, maka tingkat efisiensi dari capaian pada sasaran ini adalah sebesar 81,03%.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 9 (sembilan) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang capaian strategis ini yaitu:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian kinerja 133,50% dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Program Penyuluhan Pertanian dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan capaian kinerja 132,50% dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Program yang capaian kinerjanya tidak mencapai 100% diantaranya :

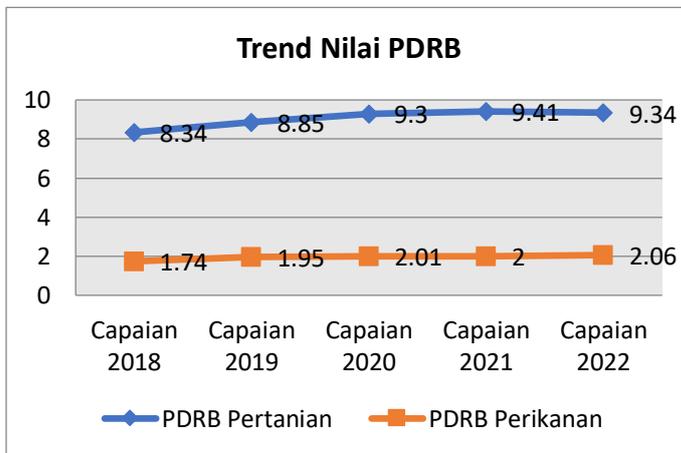
- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan capaian kinerja 98% dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.
- b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian kinerja 53,64% dilaksanakan melalui :
 1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.

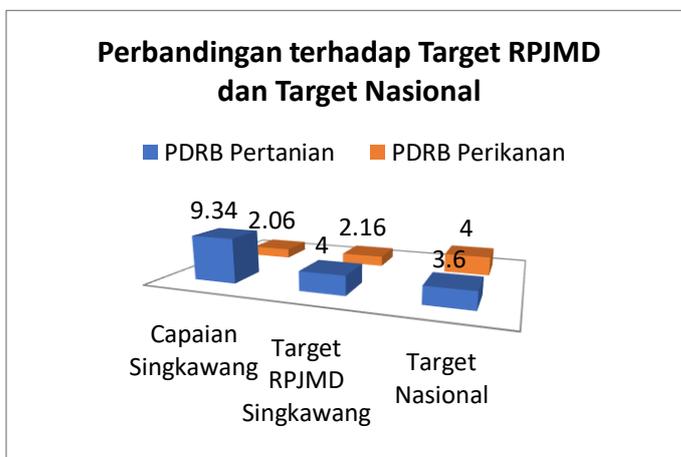
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah	Nilai PDRB Sektor Pertanian	9,30	9,41	9,34	4,00
	Nilai PDRB Sektor Perikanan	2,01	2,00	2,06	2,16



Nilai PDRB Sektor Pertanian sebagaimana data yang disajikan terlihat selalu terjadi peningkatan, walaupun nilainya tidak terlalu besar. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan tetapi angka tersebut tetap melebihi target akhir RPJMD tahun 2022. Sedangkan nilai PDRB Sektor Perikanan mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.



serta melampaui target nasional. Sedangkan untuk nilai PDRB sektor perikanan masih belum mampu mencapai target baik RPJMD maupun target nasional.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indikator nilai PDRB sektor pertanian dalam pencapaiannya memiliki hambatan, diantaranya :
 - a. Sebagian besar petani padi masih bersifat subsistem, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
 - b. Ketergantungan petani dan peternak terhadap bantuan pemerintah.
 - c. Kelembagaan petani yang ada kurang optimal.
 - d. Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis baik yang bersifat Zoonosis maupun yang non zoonosis.
 - e. Harga Pupuk yang mahal.
 - f. Penggunaan teknologi yang masih sederhana.

Strategi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan hal sebagai berikut :

- a. Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul.
- b. Peningkatan Infrastruktur Pertanian.
- c. Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah.
- d. Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- e. Memperkuat Peran dari UPT PUSKESWAN baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana pendukung.
- f. Membimbing petani supaya dapat membuat pupuk sendiri dari bahan yang tersedia di lingkungannya.
- g. Menerapkan Pertanian organik yang ramah lingkungan agar membuat tanah lebih subur untuk jangka panjang.
- h. Melaksanakan pelatihan terhadap penerapan teknologi yang terbarukan.

2. Untuk indikator nilai PDRB sektor perikanan belum mencapai target, dikarenakan:

- a. Terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di bidang perikanan.
- b. Pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.
- c. Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas.
- d. Adanya penurunan kualitas sumberdaya perairan budidaya.
- e. Kurangnya Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pengolahan ikan sehingga Daya saing produk olahan Ikan masih relatif rendah.
- f. Ketergantungan pelaku usaha perikanan terhadap bantuan pemerintah.

Upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi masalah yang ada yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk kegiatan Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan.
- b. Melaksanakan pelatihan dan memberikan bantuan prasarana dan sarana pembudidaya ikan.
- c. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan, agar mau dan mampu menerima serta menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna yang menguntungkan.
- d. Pelatihan /apresiasi nilai tambah perikanan dan bantuan sarana produksi, sarana pengolahan dan pemasaran.
- e. Pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan.
- f. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
- g. Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah.
- h. Mendorong terselenggaranya proses pelatihan teknis dan pembinaan, untuk meningkatkan keterampilan yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan teknologi.

- i. Meningkatkan ketenagaan usaha bagi nelayan tangkap dengan pemberian Asuransi Nelayan.

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86	85,70	99,65

Pada indikator sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) indikator yaitu skor pola pangan harapan yang pada tahun 2022 ini, ditargetkan sebesar 86. Akhir tahun 2022, skor PPH dapat terealisasi sebesar 85,70 maka tingkat capaiannya sebesar 99,65%

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	1.520.808.750	1.438.701.482	94,60	99,65	n/a
	Pengawasan Keamanan Pangan	3.900.000	3.900.000	100		
Rata-Rata				97,30	99,65	n/a

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 97,30% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,65%, maka pada sasaran ini tingkat efisien penggunaan sumber dayanya belum terdapat efisiensi.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

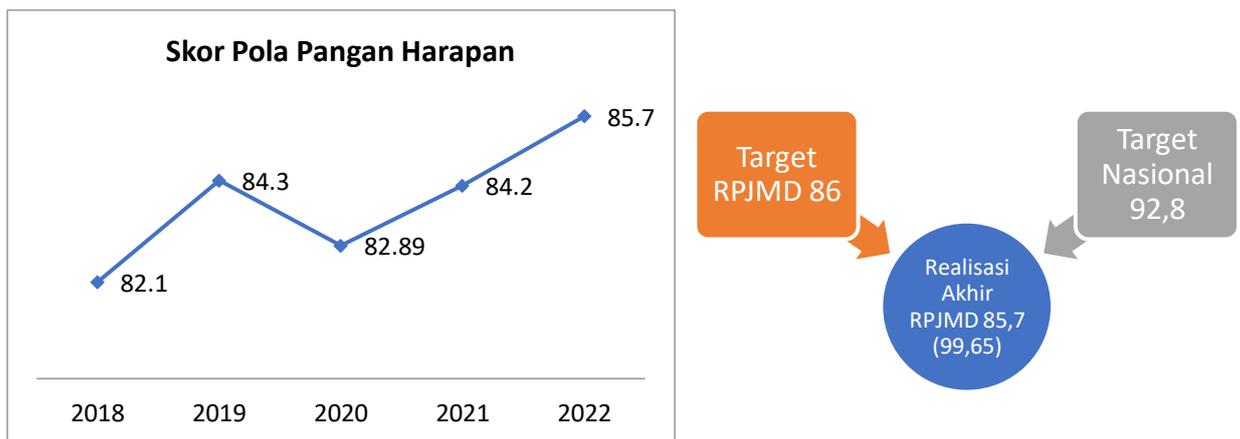
Sasaran ini dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja dan target akhir 2022



Skor pola pangan harapan mulai tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan, sempat turun sebesar 1,41 di tahun 2020 namun bisa kembali mencapai trend yang baik ditahun 2021 sampai 2022. Tahun 2022 skor PPH Kota Singkawang sebesar 85,70 yang mana angka tersebut belum dapat mencapai target akhir RPJMD yaitu 86. Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 92,8, capaian tersebut juga belum dapat melampaui target nasional. Pemerintah daerah kedepannya berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD ataupun target nasional.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Skor pola pangan harapan sangat dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan.

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Konsumsi energi masyarakat terhadap kelompok pangan umbi-umbian masih rendah sebesar 33 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari.
2. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan Buah/Biji Berminyak masih rendah sebesar 6 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 63 kkal/kap/hari.
3. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan kacang-kacangan masih rendah yaitu sebesar 51 kkal/kap/hari dari angka kecukupan energi sebesar 105 kkal/kap/hari.
4. Konsumsi terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah sebesar 99 kkal/kaphari di bawah angka kecukupan energi sebesar 126 kkal/kap/hari.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2022, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus melakukan peningkatan capaian kinerja pada indikator sasaran strategis ini. Oleh karena itu, beberapa upaya solutif yang telah dilakukan antara lain :

1. Kampanye, promosi, gerakan konsumsi pangan lokal kepada kelompok masyarakat, anak sekolah baik secara langsung maupun media sosial.
2. Kampanye makan buah dan sayur kepada anak-anak sekolah.
3. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman umbi-umbian, sayur dan buah dalam upaya ketersediaan pangan keluarga.
4. Pelibatan peran dukungan Camat, Lurah, RT, Tokoh Masyarakat untuk memberikan motivasi, mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan.

8. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.23
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	81	82,50	101,85
		2	Indeks Kualitas Udara	86	87,22	101,42
		3	Indeks Tutupan Lahan	36,53	34,42	94,22
Rata-rata						99,16

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator pertama adalah indeks kualitas air dengan target 81%, pada akhir Tahun 2022 indeks kualitas air terealisasi sebesar 82,50%, sehingga capaian kinerja sebesar 101,85%. Indikator kedua yaitu indeks kualitas udara yang realisasinya Tahun 2022 sebesar 87,22 dari target 86, sehingga capaian kinerja sebesar 101,42% artinya bahwa target yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Indikator ketiga yaitu indeks tutupan lahan dengan target 36,53% pada tahun 2022 realisasinya adalah 34,42% dengan capaian sebesar 94,22%, artinya pencapaian indikator ketiga sasaran ini hampir mencapai target.

Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan rata-rata capaiannya adalah 99,16%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan	Perencanaan Lingkungan Hidup	54.487.400	53.743.900	98,64	99,16	n/a
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	84.613.200	76.812.325	90,78		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.986.965.723	341.377.733	17,18		
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	6.022.000	4.821.500	80,06		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	43.363.000	42.708.250	98,49		
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.055.151.700	1.943.716.239	94,58		
Rata-Rata				79,95	99,16	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 79,95% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,16%, maka pada sasaran ini belum terdapat efisiensi penggunaan sumber dayanya.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang pencapaian kinerjanya 100% pada sasaran ini yaitu :

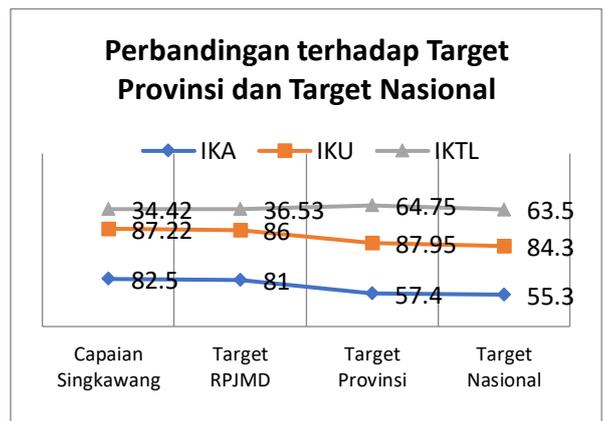
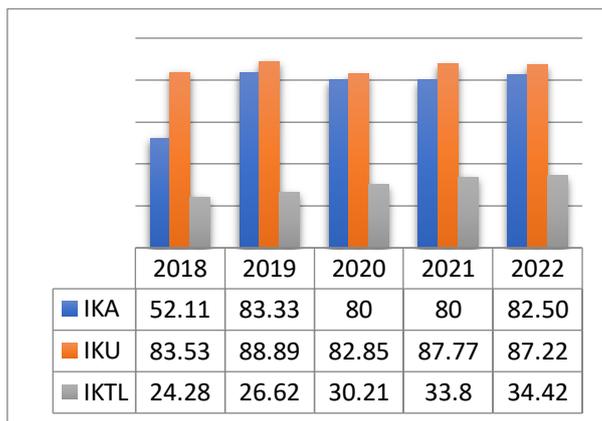
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Kegiatan ini untuk pelaksanaan uji kualitas air dan udara yang dilaksanakan setahun 2 kali, untuk operasional pelaksanaan kegiatan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
 2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait lingkungan hidup;
 3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan

rehabilitasi lahan kritis ini mempunyai dampak kedepan dalam peningkatan kualitas lahan, hutan serta kualitas udara.

- c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan capaian kinerja 100%.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian kinerja 100%.

Adapun program yang capaian kerjanya tidak mencapai 100% pada sasaran ini yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan capaian program 95%. Kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan pengelolaan keanekaragam hayati adalah pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) khususnya pengelolaan Taman Kota yang berjumlah 34 Taman atau seluas 333 Ha serta pemeliharaan pohon-pohon dilokasi publik.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022



Indeks kualitas air pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan menjadi 82,50 (kriteria cemar ringan) dan nilai tersebut sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu 81. Jika dibandingkan dengan target Provinsi Kalimantan Barat dan target Nasional, indeks tersebut telah melebihi dari kedua target tersebut.

Begitu juga dengan Indeks kualitas udara yang terlihat semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (kriteria sangat baik) angka tersebut juga melebihi target akhir RPJMD dan juga target nasional, namun masih berada dibawah target Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara indeks tutupan lahan menunjukkan angka yang semakin meningkat namun menunjukkan bahwa indeks tutupan lahan masih jauh dari target akhir RPJMD, target Provinsi Kalimantan Barat dan juga target nasional yang ditetapkan. Dari data ini menunjukkan bahwa indeks tutupan lahan Kota Singkawang masih sangat rentan (waspada). Predikat ini adalah predikat terendah.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indeks kualitas air

Indeks kualitas air tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih pada kategori cemar ringan. Kondisi kualitas air masih pada kategori cemar ringan, disebabkan oleh :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.
- c. Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai yang belum dilakukan tindakan pengendalian.

Upaya yang dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Memberikan informasi dan himbuan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan billboard.
- c. Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam menindaklanjuti pencemaran air.
- d. Adanya aksi pembersihan sungai dan selokan secara berkala dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indeks kualitas udara tahun 2022 sebesar 87,22, ini menunjukkan kategori sangat baik.

Indeks kualitas udara mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.
- b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- c. Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
- d. Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
- e. Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
- f. Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.

Upaya yang tetap dilakukan untuk menjaga kualitas udara antara lain:

- a. Pemeliharaan ruang terbuka hijau.
 - b. Penanaman pohon pada lokasi lahan kritis.
 - c. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi masyarakat untuk melakukan penanaman pohon.
 - d. Pembentukan dan pembinaan kampung iklim.
- ## 3. Indeks Tutupan Lahan

Pada tahun 2022 sebesar 34,42 yang masuk dalam kategori waspada. Kondisi ini merupakan kondisi rawan yaitu pada titik kritis tutupan lahan. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.

- b. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- c. Penebangan liar.
- d. Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.
- e. Penambangan mineral liar.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan terutama terkait usaha/kegiatan yang akan memulai pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai dengan tata ruang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan dengan memperhatikan dokumen Lingkungan yang sudah ditetapkan.
- c. Melaksanakan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- d. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- e. Melakukan pembinaan dan pembentukan kampung iklim.
- f. Rehabilitasi wilayah pesisir dengan penanaman pohon.
- g. Penanaman pada beberapa lokasi lahan kritis.

9. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.26
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	85,04	89.51
		2	Nilai LPPD	ST	n/a	n/a
		3	Nilai SPBE	2,5 (cukup)	2,6 (baik)	104%
Rata-rata					96,76	

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 3 (tiga) indikator. Indikator pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan 95 pada tahun 2022 dengan realisasi akhir sebesar 85,04 dengan capaian sebesar 89,51%.

Indikator kedua yaitu nilai LPPD dengan target Sangat Tinggi, pada tahun 2022 nilai LPPD belum bisa disajikan karena sampai saat ini belum dikeluarkan hasil penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri.

Indikator ketiga yaitu Nilai SPBE dengan target nilai 2,5, pada Tahun 2022 berhasil melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 2,6 dengan capaian 104%.

Memperhatikan data capaian kinerja, untuk sementara dapat dihitung rata-rata tingkat capaian sebesar 96,76% (tanpa nilai LPPD).

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pendaftaran Penduduk	39.347.880	38.500.549	97,85	96,76	n/a
	Pencatatan Sipil	48.738.400	42.512.971	87,23		
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	132.045.040	120.239.476	91,06		
	Pengelolaan Profil Kependudukan	13.999.600	11.652.300	83,23		
	Aplikasi Informatika	1.794.151.200	1.730.314.892	96,44		
	Informasi dan Komunikasi Publik	1.212.416.300	1.117.448.495	92,17		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.441.200	160.678.612	92,11		
	Penyeenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	36.031.500	34.213.828	94,96		
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.839.729.718	5.702.257.743	72,74		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	427.832.040	409.539.925	95,72		
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19.320.000	13.140.000	68,01		
	Pengelolaan Arsip	26.856.200	24.026.750	89,46		
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7.070.900	912.000	12,90		
	Pembinaan Perpustakaan	286.932.600	279.529.829	97,42		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
	Kepegawaian Daerah	1.428.695.200	1.216.032.725	85,11		
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.996.911.000	2.797.112.110	93,33		
	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	43.004.860.059	41.763.544.728	97,11		
Rata-rata				85,11	96,76	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,11% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,76%, maka pada sasaran belum terdapat efisiensi penggunaan sumber dayanya.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh:

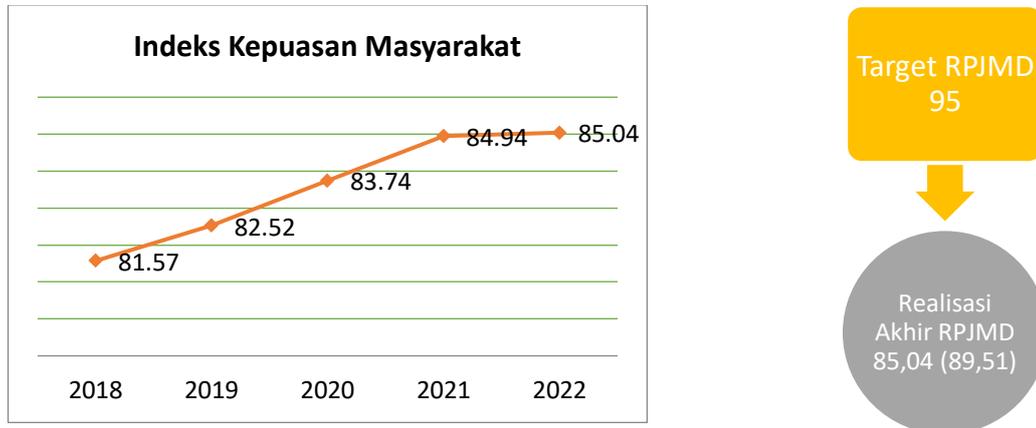
1. Terdapat 12 (dua belas) Program untuk menunjang pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat yaitu:
 - a. Program pendaftaran penduduk dengan capaian kinerja 87,28% dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - b. Program pencatatan sipil dengan capaian kinerja 87,28% dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pencatatan sipil.
 - c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan capaian kinerja 87,28% dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan serta kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - d. Program pengelolaan profil kependudukan dengan capaian kinerja 87,28% dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan profil kependudukan.

- e. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.
- f. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota dan kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
- g. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan capaian kinerja 100% dilaksanakan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota.
- h. Program pengelolaan arsip dengan capaian kinerja 90% dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.
- i. Program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan capaian kinerja 12,89% dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota dan kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.
- j. Program pembinaan perpustakaan dengan capaian kinerja 97,43% dilaksanakan melalui Kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

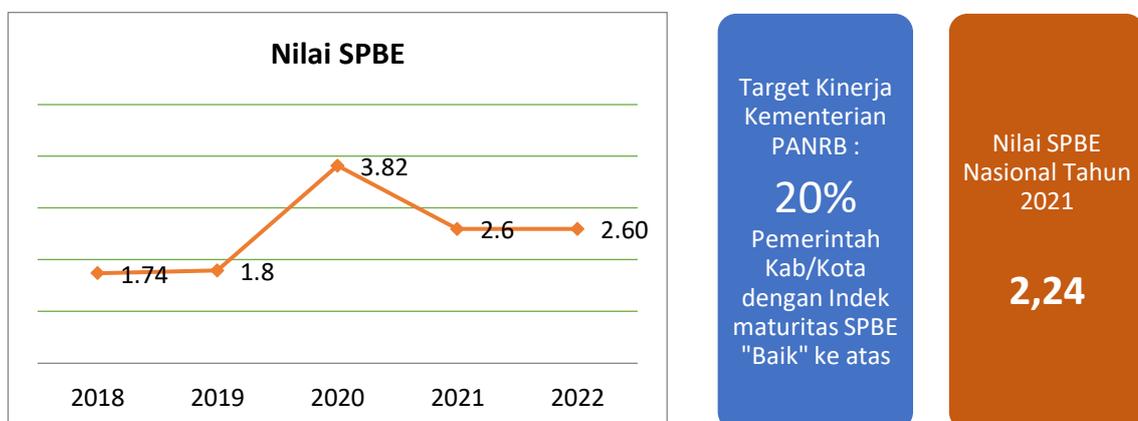
- k. Program kepegawaian daerah dengan capaian kinerja 81,85% dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian SDM; kegiatan mutasi dan promosi ASN; kegiatan pengembangan kompetensi ASN; dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
1. Program pengembangan sumber daya manusia dengan capaian kinerja 93,33% dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
2. Terdapat 1 (satu) Program untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai LPPD yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, melalui kegiatan administrasi tata pemerintahan.
3. Terdapat 4 (empat) program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Nilai SPBE, yaitu :
 - a. Program Aplikasi informatika dengan capaian kinerja 100% melalui kegiatan:
 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan capaian kinerja 100%,
 - b. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja 92,55%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja dan target akhir 2022



1. Nilai indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya selalu meningkat yang diikuti juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD selalu dilakukan evaluasi terhadap hasil indeks kepuasan masyarakat agar menjadi perhatian dan perbaikan dalam pelayanan publik.
2. Nilai LPPD sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum dapat diketahui karena belum dikeluarkannya hasil evaluasi penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian target dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



3. Trend nilai SPBE Pemerintah Kota Singkawang yang dimulai sejak Tahun 2018 sampai tahun 2022 selalu meningkat. Untuk penilaian pada tahun 2020 Pemerintah Kota Singkawang melaksanakan perhitungan atau penilaian secara mandiri. Sedangkan pada tahun 2022 untuk Pemerintah Kota Singkawang tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena pada tahun sebelumnya (2021) nilai SPBE Pemerintah Kota Singkawang telah mencapai target nasional yaitu berkategori Baik. Dengan hasil tersebut nilai SPBE Pemerintah Kota Singkawang telah melampaui nilai SPBE nasional serta mencapai target kinerja Kementerian PANRB dengan kategori “Baik”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat belum mencapai target, adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah :
 - a. Sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
 - b. Sebagian besar metode survey kepuasan masyarakat masih belum menggunakan IT sehingga untuk pengolahan data hasil SKM sangat lama prosesnya.
 - c. Belum adanya pemahaman yang sama bagi Perangkat Daerah terkait peran dan fungsi survey kepuasan masyarakat.
Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
 - a. Melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan SKM.
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada TAPD dari hasil evaluasi hasil SKM untuk dapat difasilitasi penganggaran program/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada perangkat daerah.

- d. Mendorong perangkat daerah/unit kerja menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan SKM.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil SKM.
2. Indikator nilai LPPD, sampai saat ini belum dikeluarkan hasil evaluasi penilaian LPPD oleh KEMENDAGRI, namun terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini yaitu:
- a. Adanya perubahan indikator dalam penilaian berdasarkan kategori yaitu pemerintah daerah maju, sedang dan terbelakang. Pemerintah Kota Singkawang masuk kategori sedang.
 - b. Masih adanya perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data.
 - c. Beberapa data dukung Indikator Kinerja Kunci yang disampaikan berubah-ubah dari perangkat daerah.
 - d. Dokumen laporan LAKIP menjadi salah satu bagian dalam Bab Laporan LPPD sesuai dengan perubahan peraturan, sehingga laporan LAKIP berpengaruh terhadap laporan LPPD.
 - e. Dengan terbatasnya anggaran yang terus mengalami penurunan, sangat mempengaruhi capaian program kegiatan pada perangkat daerah yang berada dibawah target, termasuk untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- a. Melakukan koordinasi terkait pengisian data LPPD dengan seluruh perangkat daerah.
 - b. Melaksanakan sosialisasi pengisian data kepada petugas pengelola LPPD pada perangkat daerah.
 - c. Melakukan penguatan SDM pengelola LAKIP SKPD.
 - d. Melakukan koordinasi, verifikasi dan asistensi laporan LAKIP Perangkat Daerah dan dokumen pendukung LAKIP Tingkat Kota.
3. Indikator Indeks SPBE pada tahun 2022 dapat mencapai target dengan nilai “BAIK”, hal ini tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Dibangunnya TCM (*Telematic Control Management*) Room sebagai *Command Centre* yang banyak memberikan manfaat bagi IT di Kota Singkawang.
- b. Tersedianya dokumen-dokumen dalam penerapan pengembangan aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung layanan.
- c. Kekuatan Pemerintah Kota Singkawang dalam hal aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah telah memiliki kematangan dalam hal layanan jaringan intra instansi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen-dokumen terkait jaringan intranet, evaluasi jaringan dan pemanfaatan jaringan.
- d. Telah disusunnya dokumen Master Plan Smart City yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- e. Penyediaan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) Singkawang Tanggap (SIGAP) 112.
- f. Melakukan kerjasama dengan Kementerian KOMINFO melalui Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan dalam pelaksanaan kegiatan Digital Talent Scholarship (DTS).

Meskipun dalam pencapaian target telah memenuhi capaian, namun masih terjadi hambatan/permasalahannya yaitu belum maksimalnya penyelenggaraan konferensi pers oleh OPD selaku *leading sector* dengan memanfaatkan TCM Room.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.29
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai SAKIP	BB	B	80
		2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	-

Dalam sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan diukur melalui indikator kinerja utama Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap laporan keuangan. Pada tahun 2022 indikator nilai SAKIP dengan target BB masih belum dapat tercapai. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang masih mendapat predikat B. Selanjutnya untuk opini BPK terhadap laporan keuangan belum bisa disajikan karena masih dalam proses pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perekonomian dan Pembangunan	957.614.023	921.129.939	96,19	80	n/a
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	299.046.800	282.601.930	94,50		
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	69.933.000	64.925.750	92,84		
	Pengelolaan Keuangan Daerah	8.388.180.382	5.533.886.985	65,97		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	895.467.250	502.687.845	56,14		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.956.655.300	1.909.878.776	97,61		
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.039.228.100	7.510.549.163	83,09		
Rata-rata				83,76	80	n/a

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 83,76% dan capaian kinerja sementara yaitu 80% (tanpa Opini BPK) dapat dinyatakan dalam pencapaian sasaran ini belum terdapat efisiensi.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program, yaitu:

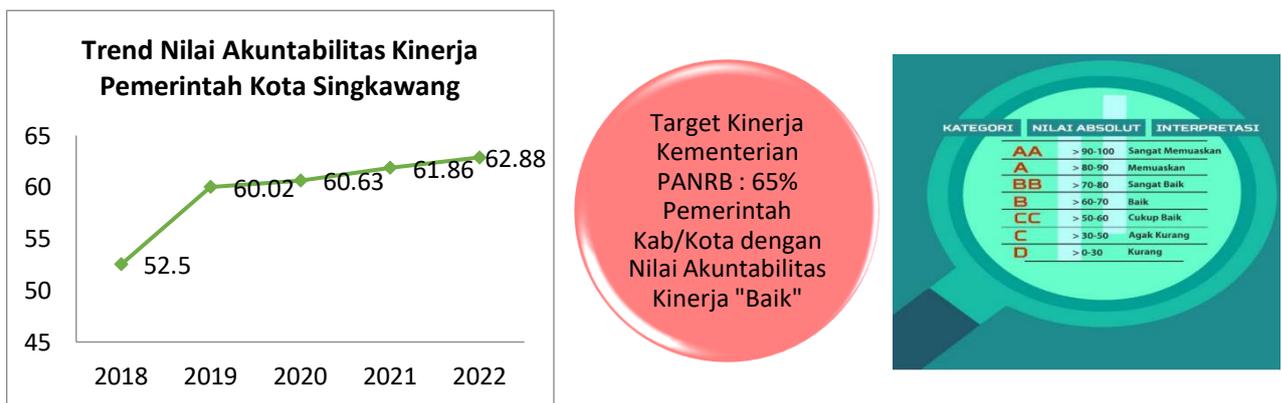
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

- b. Program pengelolaan keuangan daerah dengan capaian 100%, melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah kabupaten/kota.
- c. Program pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian 100% melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

❖ **Nilai SAKIP**

Tabel 3.31
Perbandingan realisasi kinerja dan target akhir 2022



Target Kinerja Kementerian PANRB : 65% Pemerintah Kab/Kota dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"

KATEGORI	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI
AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
A	> 80-90	Memuaskan
BB	> 70-80	Sangat Baik
B	> 60-70	Baik
CC	> 50-60	Cukup Baik
C	> 30-50	Agak Kurang
D	> 0-30	Kurang

Trend nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Singkawang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komitmen pimpinan daerah dan seluruh perangkat daerah yang disertai pelaksanaan kinerja untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja sebagai gambaran pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran terus ditingkatkan.

Jika melihat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada dokumen Rencana Strategis dengan indikator Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas “Baik” untuk Kabupaten Kota maka hasil akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Singkawang telah dikatakan berhasil mencapai target tersebut. Namun demikian dengan target BB yang ditetapkan pada RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, maka capaian tersebut belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

❖ Opini BPK

2017	2018	2019	2020	2021
• WTP				

Secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang berhasil diperoleh. Untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Singkawang berupaya terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Kedepan diharapkan untuk memperhatikan keberhasilan ini dengan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indikator Nilai SAKIP Pemerintah Kota tahun 2022 telah ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya yaitu predikat baik, meskipun belum mencapai target. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kualitas dokumen perencanaan belum berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan pada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan adanya mekanisme *crosscutting* lintas perangkat daerah.
 - c. Pemilihan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian strategis sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang tidak efektif dan efisien dan menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran.
 - d. Evaluasi atas program/kegiatan perlu ditingkatkan dengan memfokuskan kepada hasil (outcome), sehingga dapat meningkatkan capaian hasil program prioritas pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

- e. Kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- f. Sebagian perangkat daerah belum mengungkapkan analisis capaian kinerja, seperti analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegiatan pencapaian kinerja pada laporan kinerja.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Penguatan terhadap tim SAKIP dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah dalam perbaikan SAKIP Kota Singkawang.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim KemenpanRB serta Provinsi.
 - c. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang.
 - d. Berkoordinasi aktif dengan seluruh perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - e. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KemenpanRB terutama perbaikan beberapa komponen yang sangat berpengaruh. Perbaikan dokumen perencanaan menjadi komponen pengungkit dalam evaluasi SAKIP dan menjadi dokumen dalam materi revisi RPJMD.
 - f. Penguatan komitmen dan integritas para pimpinan, pengelola dan para pelaksana kegiatan.
2. Indikator opini BPK terhadap laporan keuangan belum dapat disajikan mengingat masih dalam proses pemeriksaan. Memperhatikan trend selama 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Singkawang telah memperoleh opini WTP, namun tetap melakukan upaya dalam rangka pencapaian sasaran yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- c. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;
- e. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;
- f. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT yang efisien dan efektif; dan
- g. Melakukan kegiatan Evaluasi dan Koordinasi secara berkala dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;
- h. Melakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah, dalam bentuk kegiatan pendataan dan pendaftaran secara masif terhadap Wajib Pajak Baru;
- i. Melakukan Intensifikasi Pajak Daerah dalam bentuk Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Pajak Daerah dengan memperluas *channel-channel* pembayaran pajak daerah, sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya;
- j. Melaksanakan kegiatan jemput pajak ke daerah-daerah pinggiran kota singkawang untuk mendekatkan layanan pajak daerah;
- k. Melakukan pengawasan dan penungguan terhadap wajib pajak;
- l. Melakukan kegiatan penagihan secara persuasif terhadap wajib pajak yang belum taat pajak;
- m. Meningkatkan SDM aparatur pajak, dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan Diklat atau Bimtek Pajak Daerah;
- n. Aktifitas ekonomi masyarakat pasca pandemi sudah kembali normal, sehingga berimbas kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.32
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	1 Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100

Pada tahun 2022 maturitas SPIP mencapai target yaitu level 3. Maturitas SPIP level 3 merupakan indikator dari sasaran strategis meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	Penyelenggaraan pengawasan	1.532.450.420	1.461.242.971	95,35	100	16,41
	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	314.888.900	226.204.476	71,84		
Rata - rata				83,59	100	16,41

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,59% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaannya adalah 16,41%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

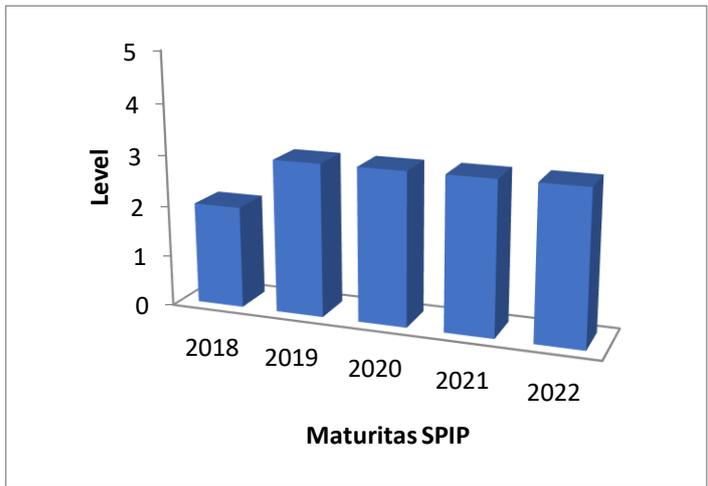
Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal didukung melalui program yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan dengan capaian 91%, melalui kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal serta kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan capaian 99%, melalui kegiatan :
 - a. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi capaian 100%;
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi capaian 100%;
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas capaian 100%;
 - d. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah capaian 0%. Hal tersebut dikarenakan Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang bersama Instansi Vertikal lainnya. Sedangkan selama Tahun 2022 masih dalam proses menunggu laporan dari Ketua Satgas Saber Pungli Kota Singkawang sehingga kegiatan tersebut belum bisa direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3				



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP yang dilakukan oleh BPKP melalui 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Hasil penilaian SPIP untuk Pemerintah Kota Singkawang sejak tahun 2019 sudah mencapai level 3 dan telah sesuai dengan target nasional.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal” dengan indikator kinerja utama “Maturitas SPIP” dengan target Level 3 pada Tahun 2022, sebagaimana tingkat maturitas SPIP dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 tetap bertahan di Level 3, dengan capaian kinerja adalah 100%. Hal ini dikarenakan konsistensi komitmen bersama dari seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mempertahankan Level Maturitas SPIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Diketahui bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan internal. Adapun penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Konsistensi dan komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Dalam pengendalian intern, salah satunya dengan mengimplementasikan strategi dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP.
3. Konsistensi komitmen bersama dari seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang untuk mempertahankan Level Maturitas SPIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.
4. Telah disusunnya pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
5. Pelaksanaan sosialisasi yang terus menerus terkait penyelenggaraan SPIP kepada Perangkat Daerah.
6. Menyusun perencanaan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis prioritas dan risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
7. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tetap dilakukan secara berkala dimasa pandemi Covid-19 dengan membatasi tatap muka, membangun komunikasi intens melalui media komunikasi dalam penyampaian bahan tindak lanjut serta melakukan pendekatan personal secara intens dengan perangkat daerah yang terdapat kerugian materil maupun aset.
8. Adanya komitmen yang tinggi dari perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan walaupun tidak dilaksanakan secara berkala dengan tatap muka pada masa pendemi COVID 19, akan tetapi dilakukan melalui media komunikasi lainnya.
9. Peningkatan kompetensi kapabilitas APIP.

10. Mempertahankan kualitas pengawasan di masa pandemi covid-19 dengan tetap mengedepankan pendampingan dan pembinaan secara berkala terhadap perangkat daerah melalui media komunikasi, pertemuan terbatas jika dianggap urgent.
11. Reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui Sistem e-Sakip.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Maturitas SPIP pada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.
13. Pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap Perangkat Daerah serta yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti probity audit, klinik konsultasi baik Dana BOS maupun PBJ.
14. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3.
15. Pro aktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan secara daring/online.
16. Melaksanakan program pelatihan mandiri dikantor dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan yang dilakukan setiap bulan.
17. Penguatan aplikasi Whistleblowing System (WBS) terkait pengaduan sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko yang kemungkinan muncul.

Meskipun telah mencapai target masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tugas tambahan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang jadwalnya telah disusun dalam PKPT.
2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan materil yang mengakibatkan kerugian daerah masih lambat dalam progres penyelesaiannya, dikarenakan ada yang sudah tidak diketahui keberadaannya, ASN yang sudah pensiun dan ada juga yang sudah meninggal dunia.

3. Belum seluruh ASN memahami dan melaksanakan implementasi SPIP sebagai bagian dari pengendalian intern pada Perangkat Daerah.
4. Berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja jumlah auditor belum memadai.
5. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, mengakibatkan sebagian besar kegiatan pengawasan khususnya pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan, sehingga sistem pengendalian intern kurang maksimal.
6. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi Covid-19, sehingga tidak maksimal dalam capaian kinerja di beberapa kegiatan pengawasan.

Berikut adalah upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut :

1. Menyusun perencanaan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis prioritas dan risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku melalui sistem e-LHP.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dengan cara mereviu secara berkala Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi serta melakukan analisis risiko secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja dan risiko strategis daerah.
4. Komitmen Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah dalam pengendalian intern pemerintah salah satunya adalah mengimplementasikan SPIP sebagai strategi dalam pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP.
5. Komitmen seluruh ASN Inspektorat Daerah Kota Singkawang dalam mempertahankan Level Kapabilitas APIP.
6. Mempertahankan kualitas pengawasan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepankan pendampingan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah melalui media komunikasi, pertemuan yang terbatas jika dianggap urgent.

7. Tetap melaksanakan reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui sistem e-sakip.
8. Melakukan penilaian mandiri (self asesment) terhadap penyelenggaraan SPIP.
9. Evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara berkala.
10. Melakukan penilaian mandiri (self asesment) level Kapabilitas APIP.
11. Evaluasi atas penilaian mandiri (self asesment) level Kapabilitas APIP.
12. Proaktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun daring/online.
13. Melaksanakan program pelatihan mandiri dikantor dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan yang dilakukan setiap bulan.
14. Mengusulkan untuk penambahan jumlah auditor serta pembentukan Inspektur Pembantu Khusus.

12. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.35
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,00	72,46	101,19

Pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator angka usia harapan hidup, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72,00 dan sesuai data yang dirilis oleh BPS untuk angka usia harapan hidup tahun 2022 realisasinya sebesar 72,46 sehingga capaiannya adalah 101,19%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.36
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	34.267.948.306	30.350.174.856	88,57	101,19	22,29
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	427.832.040	409.539.925	95,72		
	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	32.310.800	25.815.000	79,90		
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	19.320.000	13.140.000	68,01		
	Pengendalian penduduk	27.935.100	26.340.500	94,29		
	Pembinaan keluarga berencana	1.103.829.920	796.547.938	72,16		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.155.880.000	620.018.000	53,64		
Rata-rata				78,90	101,19	22,29

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 78,90% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,19%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi mencapai 22,29%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat 7 (tujuh) program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

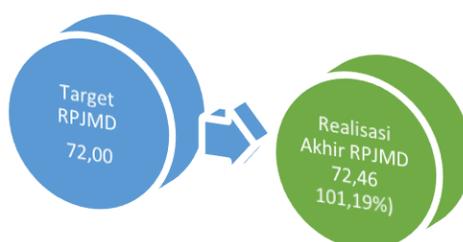
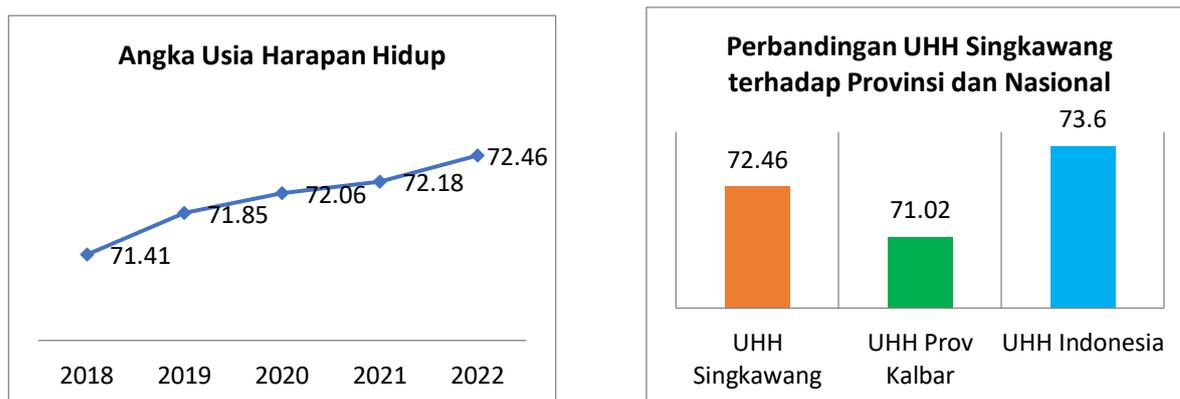
1. Program pemenuhan UKP dan UKM Daerah dengan capaian 87%, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanhgan Daerah Kab/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota.
2. Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan dengan capaian kinerja 96%, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota.
 - b. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota.
 - c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Kab/Kota.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Kab/Kota.
 - e. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Kab/Kota.
 3. Program Sediaan farmasi, alkes, makanan dan minuman dengan capaian kinerja 80%, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional.
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
 - c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) anatar lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
 - d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.
 - e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
 4. Program pemberdayaan masyarakat target dengan capaian sebesar 68%, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota.
- b. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Prmotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota.
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehawan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022



Berdasarkan grafik diatas angka usia harapan hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 72 maka di tahun 2022 realisasi kinerja tersebut sudah terlampaui yaitu sebesar 72,46. Usia Harapan Hidup Kota Singkawang juga berada diatas angka Provinsi Kalimantan Barat namun belum dapat mencapai angka UHH Nasional (Indonesia).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Strategi dalam pencapaian indikator angka usia harapan hidup yang telah melebihi pencapaian target yaitu :

- a. Sinergisitas dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tingkat Kota, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana hingga UPT Puskesmas.
- b. Penyusunan program, kegiatan/sub kegiatan yang lebih sensitif, aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
- c. Penyuluhan kepada warga masyarakat yang dilakukan secara rutin oleh petugas puskesmas di puskesmas dan posyandu.
- d. Bagi kasus ibu yang terindikasi KEK dilaksanakan program tambahan makanan melalui petugas kesehatan di puskesmas dan posyandu.
- e. Melakukan audit maternal terhadap kasus kematian ibu.
- f. Untuk kasus bayi dengan lahir berat badan kurang selalu diberi perhatian khusus oleh petugas puskesmas.
- g. Peningkatan kegiatan pemantauan secara rutin (pemantauan status gizi) bagi seluruh bayi di Posyandu.
- h. Kegiatan sweeping di rumah-rumah penduduk yang terdata mempunyai bayi.
- i. Menggalakan program gerakan masyarakat dengan pola hidup sehat pada seluruh puskesmas.
- j. Menggalakan program jumantik (satu rumah satu kader jumantik) sehingga kasus DBD menurun.

Meskipun capaian target telah melampaui target, masih terdapat hambatan dalam pencapaian strategis ini adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Kesehatan di lapangan.
- b. Belum optimalnya manajemen perencanaan kesehatan.
- c. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam usaha preventif kesehatan.
- d. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.38
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,92	99,92
		2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,12	8,19	100,86
Rata-rata capaian						100,39

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dirumuskan melalui indikator harapan lama sekolah yang ditargetkan 12,93, tahun 2022 ini mencapai 12,92 sehingga capaian menjadi 99,92%. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,12 dan realisasinya adalah 8,19 sehingga capaiannya menjadi 100,86%. Dari kedua indikator ini rata-rata capaian pada sasaran strategis ini adalah 100,39%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	64.716.461.432	58.495.786.205	90,39	100,39	5,43
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99.772.400	99.312.550	99,54		
Rata - rata				94,96	100,39	5,43

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,96% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,39%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensinya sebesar 5,43%

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, terdapat 2 (dua) program yang menunjang dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian 100% dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, dengan capaian 100%.
 - b. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, dengan capaian 100%.
 - c. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah, dengan capaian 100%.
 - d. Rehabilitasi sedang/berat ruang sarana, prasarana dan utilitas sekolah, dengan capaian 100%.
 - e. Pengadaan meubel sekolah, dengan capaian 100%.
 - f. Pengadaan perlengkapan sekolah, dengan capaian 100%.
 - g. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, dengan capaian 100%.
 - h. Pembangunan laboratorium sekolah, dengan capaian 100%.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyiapan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar, dengan capaian 100%.
 - b. Pengelolaan dana BOS sekolah dasar, dengan capaian 100%.
 - c. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, dengan capaian 100%.
 - d. Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama, dengan capaian 100%.
 - e. Pengelolaan dana BOP PAUD, dengan capaian 100%.
 - f. Pengelolaan Pendidikan non Formal/Kesetaraan, dengan capaian 100%.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

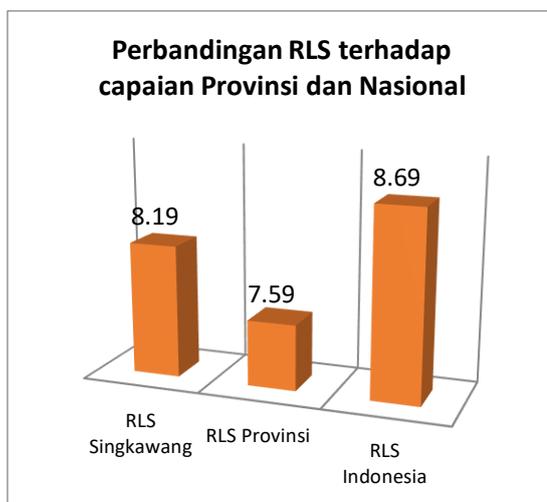
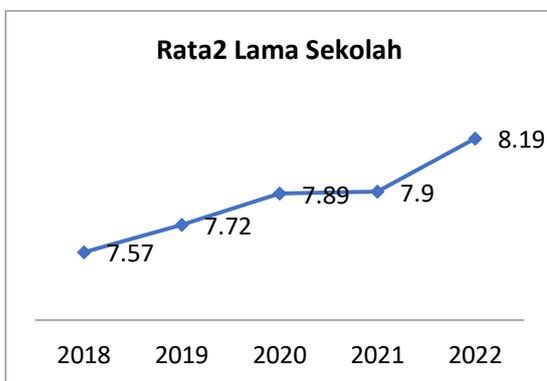
Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022





Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 angka harapan lama sekolah selalu meningkat. Hingga akhir masa RPJMD tahun 2022 angka harapan lama sekolah yaitu 12,92, dengan target RPMJD sebesar 12,93 maka capaian tersebut

hanya selisih 0,1. Untuk perbandingan dengan capaian provinsi, angka HLS Kota Singkawang telah melampaui provinsi Kalimantan Barat namun belum mampu mencapai angka nasional.



Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah, pada tahun 2022 pencapaian rata-rata lama sekolah di Kota Singkawang yaitu 8,19 telah berhasil mencapai target RPJMD (8,12). Hasil capaian ini juga telah melampaui capaian RLS Provinsi Kalimantan Barat, namun belum berhasil mengikuti capaian nasional di angka 8,69.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1. Indikator angka harapan lama sekolah tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu 0,01%. Angka ini sebenarnya dibawah target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Singkawang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian angka tersebut Antara lain :
 - a. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi;
 - b. Adanya bantuan pendidikan yaitu bantuan operasional sekolah jenjang SD dan SMP, sehingga anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya;
 - c. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pembangunan pendidikan meskipun anggaran yang belum memadai sepenuhnya.
2. Indikator angka rata-rata lama sekolah Kota Singkawang tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 0,29%. Angka ini melebihi target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Singkawang yaitu sebesar 8,12. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian angka tersebut, antara lain :
 - a. Adanya bantuan pendidikan yaitu dana BOS jenjang SD dan SMP, sehingga anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya;
 - b. Penyediaan sekolah filial bagi tempat/daerah yang masih belum terjangkau oleh penduduk;
 - c. Tingkat kesadaran masyarakat/orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak yang cukup baik.

14. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.41
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1	Persentase Jalan mantap (%)	62,3	60,25	96,71
		2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	75	86,40	115,20
		3	Persentase rumah layak huni	92,25	97,91	106,14
		4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	85,67	57,33	66,92
Rata-rata capaian					96,24	

Pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar terdiri dari 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah persentase jalan mantap dengan target tahun 2022 adalah 62,3% terealisasi sebesar 60,25% dengan capaian adalah 96,71%. Indikator kedua yaitu persentase penduduk berakses air minum terealisasi 86,40% dari target 75% sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,20%. Indikator ketiga adalah persentase rumah layak huni dengan target tahun 2022 sebesar 92,25% terealisasi sebesar 97,91% dengan capaian kinerja sebesar 106,14%. Indikator terakhir yaitu luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani ditargetkan 85,67% pada tahun 2022 terealisasi sebesar 57,33% sehingga capaian kinerja hanya sebesar 66,92%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Penyelenggaraan Jalan	56.085.030.855	41.178.213.986	73,42	96,24	n/a
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.357.984.136	2.718.875.835	80,97		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.805.858.600	5.024.216.600	86,54		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.021.704.194	2.982.090.790	98,69		

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.632.238.801	3.504.928.588	96,49		
Pengelolaan Pelayaran	7.680.000	7.320.000	95,31		
Pengelolaan Penerbangan	237.005.800	235.985.800	99,57		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	72.844.500	71.729.540	98,47		
Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.580.326.200	1.476.450.014	93,43		
Pengembangan Permukiman	16.394.984.424	16.339.619.777	99,66		
Pengembangan Perumahan	721.517.400	558.708.010	77,44		
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.444.813.800	6.182.030.570	95,92		
Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	3.570.666.253	2.076.412.215	58,15		
Rata-rata			88,77	96,24	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,77% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,24%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian sasaran, terdapat 13 program yang menunjang. Program yang menunjang pencapaian sasaran target pada tiap indikator yaitu:

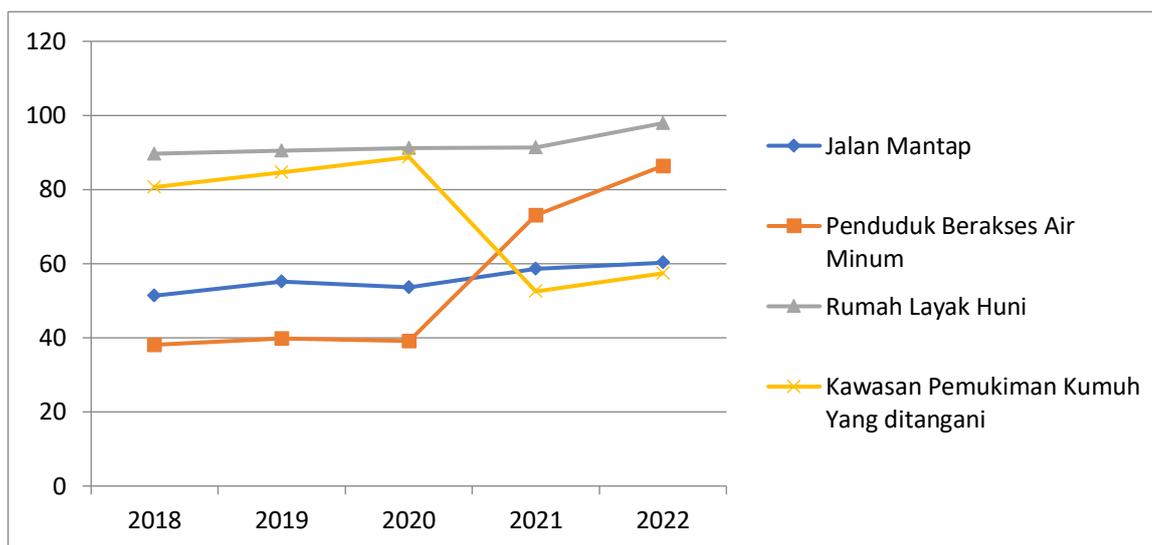
1. Program penyelenggaraan jalan, dengan capaian 92,05% yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan capaian 100% dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.

3. Program Pengembangan perumahan dengan capaian kinerja sebesar 100% dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan capaian 87,45%, dilaksanakan melalui kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5. Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh dengan capaian sebesar 88,35%, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
 - Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

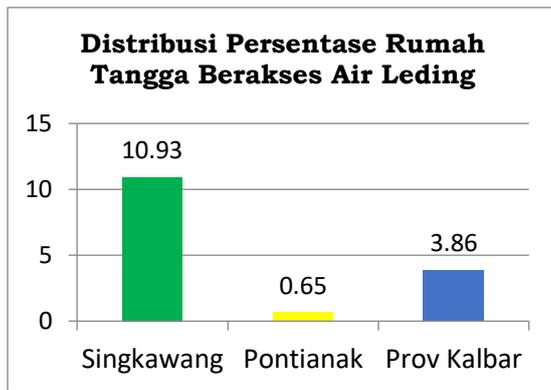
Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya kualitas infrastruktur Dasar	Persentase Jalan mantap (%)	51,36	55,14	53,54	58,67	60,25	62,30
	Persentase penduduk berakses air minum	38,11	39,74	39,17	73,17	86,40	75,00
	Persentase rumah layak huni	89,68	90,51	91,17	91,42	97,91	92,25
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani (%)	80,63	84,68	88,73	52,20	57,33	85,67

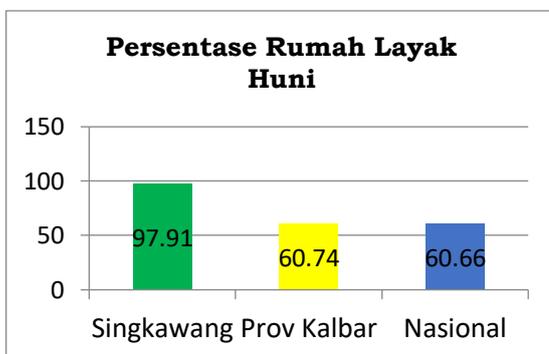


Capaian persentase jalan mantap sampai dengan akhir RPJMD tahun 2022 masih belum berhasil mencapai target, namun terlihat trend yang positif dengan semakin panjang jalan yang berkategori jalan mantap.

Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani juga belum berhasil mencapai target akhir RPJMD. Data luas kawasan permukiman yang ditangani pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dihitung berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03Ha. Selanjutnya pada akhir Tahun 2020 dilakukan reviu *baseline* kawasan kumuh dengan menetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru yang mengacu pada SK Wali Kota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57Ha. Berdasarkan 2 (dua) kebijakan diatas maka luas kawasan yang ditangani mengalami perubahan berupa penambahan target penanganan luas kawasan kumuh di Kota Singkawang sehingga berpengaruh pada realisasi capaian indikator luas kawasan kumuh yang ditangani.



Sedangkan untuk indikator persentase penduduk berakses air minum dengan target RPJMD sebesar 75%, telah berhasil dilampaui dengan angka 86,40%. Dari data BPS Provinsi Kalimantan Barat, distribusi persentase rumah tangga berakses air leding pada Kota Singkawang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Kota Pontianak maupun secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat.



Untuk indikator persentase rumah layak huni dengan nilai 97,91% telah berhasil melampaui target RPJMD Kota Singkawang, hasil tersebut juga berhasil melampaui angka provinsi Kalimantan Barat (60,74%) serta angka nasional (60,66%).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Berdasarkan data capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur Dasar, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Jalan mantap belum mencapai target, adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan APBD perubahan terlambat, sehingga masa pelaksanaan kegiatan fisik tidak cukup waktu.

- b. Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan.
- c. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/berat yang tidak dapat terpenuhi permintaannya secara tuntas.
- d. Perlunya data kondisi jalan dan jembatan setiap tahun secara *up to date*, sehingga jika terdapat perencanaan yang mendesak dapat direncanakan secepatnya.
- e. Curah hujan yang cukup tinggi sehingga penyedia cukup sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan susah.

Dalam mengatasi hambatan, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada awal tahun anggaran.
 - b. Penyusunan program tepat sasaran.
 - c. Ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Dalam penyusunan program kegiatan, lokasi sudah harus siap.
 - e. Program/kegiatan yang ditetapkan harus sesuai dengan tugas dan bidang kerja dari Bina Marga sehingga target kinerja dapat tercapai.
2. Indikator Persentase penduduk berakses air minum melebihi target yang telah ditetapkan, upaya yang dilakukan sehingga dapat mencapai target diantaranya :
- a. Memberikan sosialisasi penggunaan air bersih yang bersumber PDAM kepada masyarakat yang masih terbiasa menggunakan air selain dari PDAM.
 - b. Melaksanakan program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagai bentuk subsidi terhadap pemasangan air bersih PDAM.
 - c. Memaksimalkan pemasangan pipa distribusi agar pelayanan dapat lebih maksimal.
 - d. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber air baku.
 - e. Penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA).
 - f. Memperluas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Pipa.
 - g. Pelestarian Sumber Air Baku.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, antara lain :

- a. Masih rendahnya minat masyarakat untuk memasang sambungan rumah (SR), sebagai pelanggan PDAM.
 - b. Adanya kesulitan dilapangan terkait pemasangan pipa pada area sekitar bahu jalan maupun yang melewati tanah warga.
 - c. Rentan terhadap menurunnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air baku air minum.
 - d. Sebagian jaringan pipa distribusi dalam kondisi kurang baik.
 - e. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat perubahan diameter pipa dari pipa besar ke diameter pipa kecil.
 - f. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase.
 - g. Pipa terpasang bersinggungan dengan jalan, drainase jalan, tiang listrik dan pagar rumah warga.
3. Indikator Persentase rumah layak huni belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
- a. Masih kurangnya perhatian/kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya.
 - b. Kurangnya data pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU).
 - c. Kejadian bencana alam yang sulit diprediksi seperti cuaca ekstrim, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, serta kebakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga.
 - d. RTLH Tahun 2022 yang bersumber dari Dana DAK fisik Perumahan dan Kawasan permukiman untuk 60 unit rumah, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan baru dari Bappenas yakni penambahan dana sharing DAU yang sebelumnya 4.000.000 per unit menjadi 15.000.0000 per unit sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi Pemerintah Kota Singkawang, mengingat telah ditetapkannya PERDA APBD Tahun Anggaran 2022 yang belum memungkinkan untuk dilakukan revisi.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut, adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya.
 - b. Melakukan pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun anggaran berikutnya.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait serta meningkatkan intensitas peninjauan lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
 - d. Mempercepat proses penerbitan SK Korban Bencana sesegera mungkin dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penganggulangan rumah terdampak korban bencana.
 - e. Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting yang ada dengan melaksanakan kegiatan/subkegiatan identifikasi, pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat.
 - f. Menyusun dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan.
4. Indikator luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
- a. Adanya perubahan kebijakan dalam penanganan luas kawasan kumuh.
 - b. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah yang diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional kotaku, kota tanpa kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar dan sumber daya yang besar.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut, adalah :

- a. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (pembangunan dan peningkatan jalan/saluran) di lokasi permukiman kumuh.
- b. Melakukan refocusing dalam pengurangan kawasan kumuh yang sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. Membentuk Kelompok Kerja dan Forum Pengembangan Kawasan.

15. Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Genangan Banjir

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.47
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
15	Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	1 Luas Kawasan Genangan Banjir (Ha)	2,170	2,065	105,08

Pada sasaran menurunnya kawasan genangan banjir dengan indikator luas kawasan genangan banjir dengan target 2,170 Ha, realisasi target 2022 sebesar 2,065 Ha, dengan capaian sebesar 105,08%. Dengan capaian tersebut menunjukkan penurunan luasan kawasan genangan banjir pada tahun 2022 yang telah melewati target.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	7.498.796.664	7.474.073.250	99,67	105,08	5,41
Rata-Rata				99,67	105,08	5,41

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,67% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,08%, maka tingkat efisiensi pada sasaran menurunnya kawasan genangan banjir sebesar 5,41%.

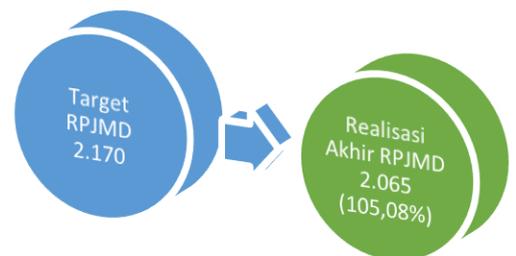
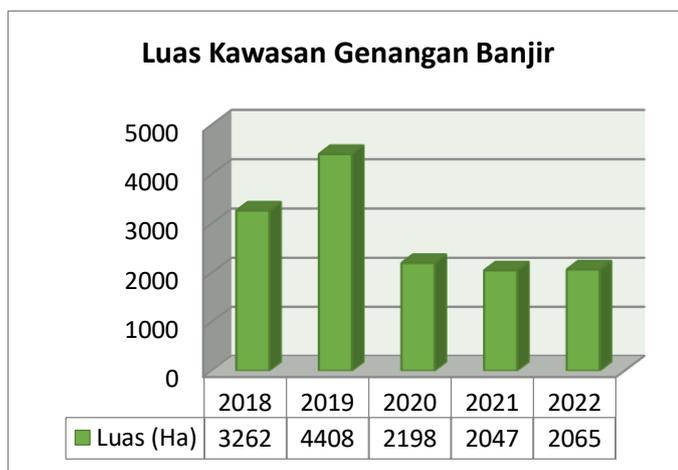
2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menurunnya kawasan genangan banjir, Program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja yaitu melalui Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dengan capaian 100%. Dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota, dengan capaian 100%, sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan dengan capaian 100%, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dengan capaian 100% serta operasi dan pemeliharaan sistem drainase dengan capaian 100%.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.49
Perbandingan realisasi kinerja dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	Luas Kawasan Genangan Banjir	3.262	4.408	2.198	2.047	2.065	2.170



Luas kawasan genangan banjir, pada tahun 2020 seluas 2,198 Ha, pada tahun 2021 mengalami penurunan luasan genangan banjir yang cukup besar yaitu seluas 2,047 Ha dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.065 Ha. Luas genangan banjir merupakan perbandingan antara luas kawasan genangan banjir berbanding dengan luas wilayah kota Singkawang yaitu seluas 50.400 Ha. Penurunan luas kawasan genangan banjir pada tahun 2022 sudah melampaui target pada akhir RPJMD.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Indikator luas kawasan genangan banjir sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya drainase untuk kepentingan bersama dalam mengatasi permasalahan banjir;
2. Pembebasan lahan untuk drainase;
3. Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi parit atau sungai;
4. Adanya pembersihan/normalisasi sungai;
5. Penambahan opsi sumber dana selain dana APBD, yaitu melalui APBN dan Swasta;

Dalam penanganan kawasan genangan banjir, terdapat beberapa hambatan dalam mengatasinya, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya penolakan dari masyarakat untuk pembangunan drainase dilahan dekat miliknya;
2. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran dan mengatur dimensi saluran sesuai kebutuhan;
3. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan;
4. Pada musim penghujan, dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan penyedia cukup sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

5. Pelaksanaan kegiatan APBD yang terlambat (dimulai bulan Juli).

16. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.50
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
16	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	1 Volume Usaha Perdagangan	1.702.787.098.525	1.524.819.330.000	89,55

Pada sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dengan indikator volume usaha perdagangan target tahun 2022 adalah Rp1.702.787.098.525 realisasinya adalah Rp.1.524.819.330.000 dengan capaian kinerja sebesar 89,55%.

1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	5.098.907.606	3.171.586.862	62,20	89,55	n/a
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	685.541.800	628.538.535	91,68		
	Pengembangan Ekspor	99.144.500	95.905.096	96,73		
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	94.411.800	94.371.761	99,96		
Rata-rata				87,64	89,55	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 87,64% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 89,55%, maka tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan belum dapat diukur efisiensinya.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

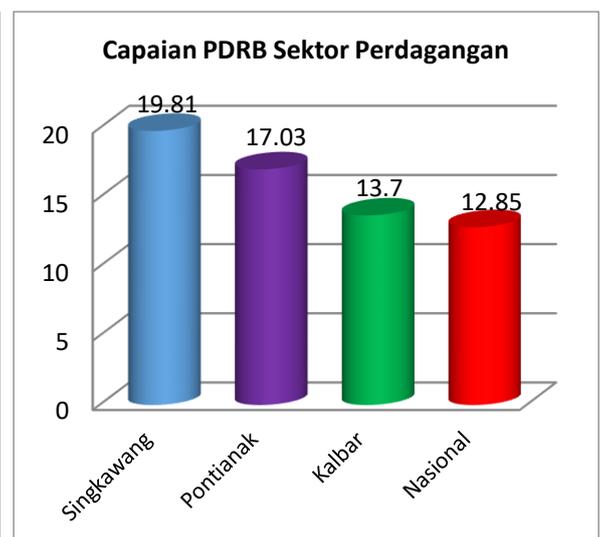
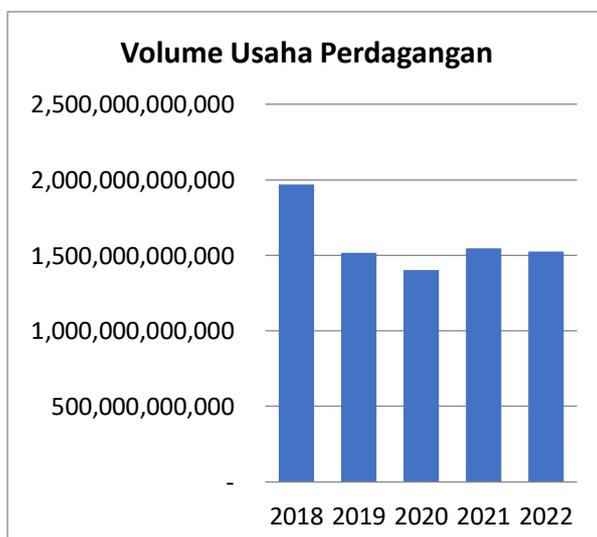
Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

- a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan capaian 74,42% melalui kegiatan:
 1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian 100%, melalui kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasaran kabupaten/kota.
- c. Program pengembangan ekspor dengan capaian 100%, melalui kegiatan penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan capaian 100%, melalui kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.52
Perbandingan realisasi kinerja dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Volume Usaha Perdagangan	1.968.185.900.000	1.518.260.220.000	1.402.154.400.000	1.547.104.200.000	1.524.819.330.000	1.702.787.098.525



Volume usaha perdagangan di Kota Singkawang dari tahun selalu mengalami fluktuasi naik dan turun. Dilihat dari data PDRB Kota Singkawang yang di publish oleh BPS Kota Singkawang, terlihat bahwa kontribusi PDRB sektor perdagangan Kota Singkawang mencapai angka 19,81. Jika dibandingkan dengan data capaian PDRB Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional, PDRB sektor perdagangan di Kota Singkawang telah melampaui capaian sekaligus menjadi penyumbang kontribusi nilai PDRB tertinggi diantara semua sektor.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Indikator volume usaha perdagangan masih belum dapat memenuhi target RPJMD, hal ini disebabkan :

1. Peningkatan omset pelaku usaha perdagangan yang relatif kecil karena menghadapi situasi dampak pandemi covid-19.
2. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan usaha perdagangan skala mikro kecil.
3. Tingginya biaya distribusi barang perdagangan yang mengakibatkan kenaikan harga barang, sedangkan daya beli masyarakat menurun sebagai dampak pandemi covid-19.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha perdagangan, antara lain:

1. Mendorong pelaku usaha perdagangan untuk berinovasi dalam memperoleh peluang pasar khususnya dalam hal pemasaran produk melalui media elektronik.
2. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha perdagangan tentang manajemen usaha.
3. Meningkatkan pengawasan distribusi barang perdagangan dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga barang.

17. Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor Pariwisata

Tabel 3.53
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
17	Berkembangnya Sektor Pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisata	370.671	1.008.607	272,10
		2	Rata-Rata Lama Tinggal	1,14	2,09	183,33
		Rata-rata				227,72

Pada sasaran berkembangnya sektor pariwisata terdiri dari 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2022 adalah 370.671, realisasi target 2022 sebesar 1.008.607, sehingga capaian sebesar 272,10%. Indikator kedua adalah rata-rata lama tinggal dengan realisasi 2,09 dari target 1,14 sehingga capaiannya sebesar 183,33%. Rata-rata capaian sasaran strategis ini adalah 227,72%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.54
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Berkembangnya Sektor Pariwisata	Pemasaran pariwisata	219.800.000	219.504.090	99,87	227,72	131,93
	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	1.511.887.176	1.386.663.238	91,72		
Rata-rata				95,79	227,72	131,93

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,79% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 227,72%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 131,93%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis berkembangnya sektor pariwisata didukung melalui program sebagai berikut:

- a. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :

1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

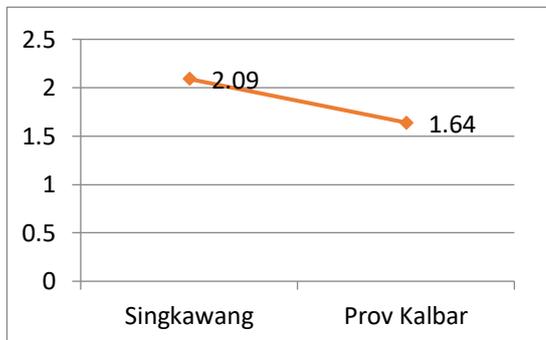
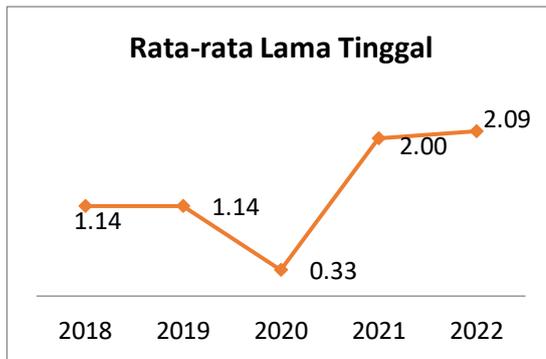
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.55
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Berkembangnya Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	721.967	722.932	529,647	642.114	1.008.607	370.671
	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)	1,14	1,14	0,33	2	2,09	1,14



Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Namun sejak pandemi covid-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan pada tahun 2020, hal ini juga terjadi pada seluruh daerah. Pemerintah Kota Singkawang tidak melakukan reviu atau perubahan terhadap target tahunan ataupun target akhir RPJMD mengingat belum dapat diprediksi kapan akhir dari pandemi covid-19. Walaupun demikian target tahunan dan target akhir RPJMD dapat dicapai dengan dukungan dari semua stakeholders yang terlibat dalam membangun pariwisata di Kota Singkawang sehingga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, jauh diatas ekspektasi yang diharapkan pada tahun 2022.



Seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan di Kota Singkawang, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Singkawang juga bertambah. Lama tinggal wisatawan pada suatu daerah akan mendorong wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata lain

pada daerah yang sama sehingga mendorong wisatawan untuk membelanjakan uang lebih banyak dan mendorong pemasukan ke daerah wisata tersebut. Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ini, rata-rata lama tinggal terus mengalami pergerakan kearah yang lebih baik. Di tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi covid-19 angka tersebut sempat turun, namun di tahun 2021 mengalami perbaikan sampai dengan akhir tahun 2022 menjadi 2,09 hari. Rata-rata lama tinggal di Kota Singkawang telah melampaui target akhir RPJMD serta mampu melewati angka rata-rata lama tinggal Provinsi Kalimantan Barat.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Untuk Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai efisiensi capaian kinerja > 100%, hal ini disebabkan di setiap peringatan hari besar keagamaan, Kota Singkawang selalu menghias kota dan mengadakan event dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata seperti Imlek dan Cap Go Meh, event Ramadhan Fair dan Idul Fitri, event Naik Dango, event Ngabayot, dan Christmast day dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu

Pemerintah Kota Singkawang juga melaksanakan pengembangan Destinasi pariwisata dengan melakukan peningkatan pembangunan pariwisata berupa Gazebo di lokasi Taman Burung, Gerbang Jalan Sylva Gunung Poteng, Pembangunan Plaza Kuliner, pembangunan jalur pejalan kaki dan pembangunan mushola di lokasi Batu Belimbing.

Pemerintah Kota Singkawang juga melaksanakan pembangunan 3 (tiga) pintu gerbang menuju Singkawang yaitu : Gerbang Mahligai Pesisir di Kecamatan Singkawang Utara, Gerbang Cap Go Meh di Kecamatan Singkawang Selatan dan Gerbang Tamak Kalawan di Kecamatan Singkawang Timur yang dibangun oleh Pihak ke-3 (CSR).

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah Kota Singkawang dengan Stakeholder, swasta, TNI/POLRI, Instansi terkait dan berbagai pihak terkait lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Kerangka pendanaan yang digunakan dalam pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi serta target pembangunan nasional.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2022

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	906.091.798.448,00	926.235.550.098,75	102,22%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	189.000.000.000,00	213.792.971.246,91	113,12%
4.1.1	Pendapatan pajak daerah	66.140.000.000,00	69.682.698.342,74	105,36%
4.1.2	Pendapatan retribusi daerah	8.040.000.000,00	4.065.789.461,00	50,57%
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.839.224.000,00	7.850.510.913,00	114,79%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	107.980.776.000,00	132.193.972.530,17	122,42%
4.2	Pendapatan Transfer	717.091.798.448,00	707.165.350.221,84	98,62%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	650.634.354.000,00	636.917.166.535,93	97,89%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.457.444.448,00	70.248.183.685,91	105,70%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	5.277.228.630,00	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	5.238.000.000,00	-
4.3.2	Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	39.228.630,00	-

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Singkawang dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja yang sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.

Tabel 3.57
Realisasi Belanja Daerah TA 2022

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71%
5.1	Belanja Operasi	766.872.831.206,00	707.187.946.338,12	92,22%
5.1.1	Belanja pegawai	387.153.901.571,00	356.894.230.162,00	92,18%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.669.341.216,00	304.403.147.276,12	92,06%
5.1.3	Belanja Subsidi	915.366.000,00	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	45.510.622.419,00	44.421.707.100,00	97,61%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.623.600.000,00	1.468.861.800,00	55,99%
5.2	Belanja Modal	167.008.543.215,00	142.137.480.343,34	85,11%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	16.012.803.449,00	4.887.776.200,00	30,52%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.539.605.960,00	30.032.744.794,00	84,51%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.697.535.028,00	26.578.905.592,74	92,62%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	81.348.382.656,00	75.303.305.731,60	92,57%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.410.216.122,00	5.334.748.025,00	98,61%
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.850.000.000,00	3.137.283.944,00	53,63%

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah dan jika APBD defisit maka APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	906.091.798.448,00	926.235.550.098,75	102,22%
BELANJA	939.731.374.421,00	852.462.710.625,46	90,71%
Total (Surplus/Defisit)	-33.639.575.973,00	73.772.839.473,29	-219,30%

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
6	PEMBIAYAAN	33.639.575.973	62.581.004.544	186,03%
6.1	Penerimaan pembiayaan	76.881.004.544,00	76.881.004.544,18	100,00%
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	76.881.004.544,00	76.881.004.544	100,00%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	43.241.428.571,00	14.300.000.000,00	33,07%
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	100,00%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.941.428.571,00	-	0,00%
Pembiayaan Neto		33.639.575.973,00	62.581.004.544,18	186,03%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	136.353.844.017,47	

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Singkawang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis. Berdasarkan hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama, dapat di simpulkan bahwa:

- 18 indikator (54,54%) dengan capaian kinerja $\geq 100\%$.
- 12 indikator (36,36%) dengan capaian kinerja antara 75% - 99,99%.
- 1 indikator (3,03%) dengan capaian kinerja 55,01% - 74,99%
- 2 indikator (6,06%) yang belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena belum rilis atau ditetapkan oleh instansi penilai.

Memperhatikan hasil capaian indikator pada seluruh sasaran, perlu mendapat perhatian terhadap indikator yang belum mencapai target sesuai target RPJMD mengingat tahun 2022 adalah akhir pelaksanaan RPJMD, sehingga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Singkawang. Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian sebagaimana berikut:

No	Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD 2022
1	Sasaran 3: Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif		
	1. Volume Usaha Koperasi	232.813.093.303	304.191.033.500
	2. Nilai PDRB sektor industri	1.044.718.040.000	1.057.405.595.164
2	Sasaran 5 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan		
	1. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	8,63	6,85
	2. Angka kemiskinan	4,67	4,6
3	Sasaran 6 : Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah		
	Nilai PDRB Sektor perikanan (%)	2,06	2,16

No	Sasaran/Indikator	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD 2022
4	Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan		
	Indeks tutupan lahan	34,42	36,53
5	Sasaran 10 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		
	Nilai SAKIP	B	BB
6	Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas pendidikan		
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,92	12,93
7	Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar		
	1. Persentase Jalan mantap (%)	60,25	62,30
	2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	57,33	85,67
8	Sasaran 16 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan		
	volume usaha perdagangan	1.524.819.330.000	1.702.787.098.524,75

Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya tercapai, memberikan pengalaman kepada jajaran Pemerintah Kota Singkawang untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas kinerja dan sistem kerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota

Singkawang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan;

4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pelayan publik; dan
5. Membuat kebijakan motivasi kerja dan kinerja berupa *reward and punishment* terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, 30 Maret 2023

Pj. Wali Kota Singkawang,



Drs. SUMASTRO, M.Si